



**MASTERPLAN SMART REGENCY
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**Edisi Revisi 2026-2029
STRATEGI PEMBANGUNAN MENUJU SMART
REGENCY**

BUKU II

**DIBUAT DAN DIREVISI OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN**

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sasaran.....	4
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Kerangka Pikirr Smart City/Smart Regency	5
BAB 2 ANALISIS STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH.....	14
2.1 Hasil Kajian Internal Pemerintah Daerah	14
2.2 Analisa PESTEL.....	19
BAB 3 PETA JALAN MUARA ENIM <i>SMART REGENCY</i>	25
3.1 Visi Presiden Republik Indonesia.....	25
3.2 Visi, Misi, dan Program Kabupaten Muara Enim	27
3.2.1 Visi Kabupaten Muara Enim	27
3.2.2 Misi Muara Enim.....	28
3.2.3 Tujuan dan Sasaran.....	29
3.2.4 Program strategis Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim	32
3.2.5 Program prioritas pembangunan daerah	33
3.3 Visi Muara Enim <i>Smart Regency</i>	33
3.4 Strategi pembangunan <i>Smart Regency</i>	41
3.5 Analisa SWOT/TOWS	44
3.5.1 Smart Governance	45
3.5.2 Smart Branding.....	50
3.5.3 Smart Society.....	55
3.5.4 Smart Economy	59
3.5.5 Smart Living.....	65
3.5.6 Smart Environment.....	69
3.6 Peta jalan pembangunan Muara Enim <i>Smart Regency</i>	73
3.7 Rencana aksi pembangunan Muara Enim <i>Smart Regency</i>	81



3.8	Program dan kegiatan OPD pelaksana Smart Regency	86
3.8.1	Smart Governance	86
3.8.2	Smart Branding	87
3.8.3	Smart Economy	88
3.8.4	Smart Society.....	89
3.8.5	Smart Living	90
3.8.6	Smart Environment.....	91
3.9	Quick Wins Muara Enim Smart Regency	92
BAB 4	PENUTUP	94



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Muara Enim dengan Misi RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029.....	28
Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029.....	30
Tabel 3.3 Sandingan Tahapan Pembangunan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2026-2030.....	31
Tabel 3.4 Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Muara Enim dengan Misi RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 dan dimensi smart regency.....	34
Tabel 3.5 Keselarasan sasaran dan indikator pada RPJPD Kabupaten Muara Enim dengan Misi RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 dan dimensi Smart Regency	35
Tabel 3.6 Produk dalam strategi pembangunan Smart Governance	41
Tabel 3.7 Produk dalam strategi pembangunan Smart Branding	42
Tabel 3.8 Produk dalam strategi pembangunan Smart Economy	42
Tabel 3.9 Produk dalam strategi pembangunan Smart Living.....	43
Tabel 3.10 Produk dalam strategi pembangunan Smart Society	43
Tabel 3.11 Produk dalam strategi pembangunan Smart Environment	44
Tabel 3.12 Daftar aplikasi aktif yang digunakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.....	83
Tabel 3.13 Program dan Kegiatan Smart Governance.....	86
Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Smart Branding	87
Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Smart Economy.....	88
Tabel 3.16 Program dan Kegiatan Smart Society	89
Tabel 3.17 Program dan Kegiatan Smart Living	90
Tabel 3.18 Program dan Kegiatan Smart Environment	91
Tabel 3.19 Quick Wins Muara Enim Smart Regency.....	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Elemen Smart City Readiness.....	6
Gambar 1.2 Dimensi Smart City.....	7
Gambar 1.3 Smart Governance.....	8
Gambar 1.4 Smart Branding	9
Gambar 1.5 Smart Economy.....	10
Gambar 1.6 Smart Living	11
Gambar 1.7 Smart Society	12
Gambar 1.8 Smart Environment	13
Gambar 3.1 Visi Kabupaten Muara Enim.....	27



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tren pembangunan dan pengembangan kota di era digital telah berubah. Perubahan ini didorong oleh berubahnya secara signifikan peradapan dan budaya manusia akibat adanya fenomena revolusi digital atau revolusi industri ke-4 dan juga peran kecerdasan buatan. Perubahan-perubahan yang terjadi pun bersifat baru dan tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Konsep *Smart City* merupakan *framework* yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien yang mampu mengakomodasi tantangan dan identitas masing-masing kota yang unik dan jauh berbeda.

Walaupun terminologi yang paling dikenal adalah *smart city* namun variasi yang ada sebenarnya lebih beragam. Alternatif lain yang biasa digunakan misalnya *smart region*, *smart province*, *smart city/regency*, *digital city*, *future city*, dan *sustainable city*. Beragam istilah tersebut memiliki fundamental dan paradigma yang sama yaitu sebuah strategi progresif dalam memecahkan masalah dan tantangan utama perkotaan dengan inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi terkini sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*).

Perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama di kawasan perkotaan dan juga daerah-daerah. Transformasi digital ini didorong oleh beberapa faktor utama, seperti penetrasi internet yang semakin luas, adopsi perangkat mobile yang tinggi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi melalui program seperti Smart City. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang, telah menjadi pusat inovasi digital karena memiliki infrastruktur yang lebih baik, tingkat literasi teknologi yang tinggi, serta ekosistem startup yang berkembang pesat. Tren ini terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan berbasis digital, seperti *e-commerce*, transportasi daring, *fintech*, dan layanan publik berbasis aplikasi. Selain itu, pandemi COVID-19 turut mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan digital antara kota besar dan daerah terpencil, isu keamanan siber, serta kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren



teknologi digital di kota-kota Indonesia menjadi penting untuk merumuskan strategi pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, suatu daerah yang diberkahi dengan potensi SDM dan sumberdaya alam yang melimpah. Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Muara Enim berada pada fase transformatif karena telah memiliki pemimpin daerah yang baru serta berkomitmen dalam penguatan ekonomi lokal melalui strategi RPJMD 2025-2029 dan APBD yang adaptif, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penegakan hukum pertambangan, serta ketahanan pangan berkelanjutan. Meski bergantung pada batu bara, pemerintah daerah mendorong diversifikasi ekonomi, kesetaraan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semua strategi ini didukung oleh perencanaan komprehensif, anggaran memadai, sinergi segenap perangkat daerah dan masyarakat, dan penegakan tata kelola yang transparan, tertuang dalam slogannya MEMBARA (Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan), yang menjadi visi utama Kabupaten Muara Enim untuk periode 2025–2029.

Dalam mendukung ketercapaian visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peran aktif kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFO SP), berkomitmen untuk mengelola yang sudah ada dengan sebaik-baiknya dan tetap bereksplorasi menggali segala potensi yang dapat dicapai. Inovasi merupakan nafas yang sudah menyatu dengan semangat pembangunan di Muara Enim sehingga tentu saja konsep *smart city* merupakan konsep yang sejalan dan sangat relevan untuk diterapkan di Kabupaten Muara Enim. Adapun wujud nyatanya adalah melakukan pembaharuan atas *MasterPlan Smart Regency* Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Muara Enim Yang Cerdas) untuk tahun 2026-2029.

Masterplan ini berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kabupaten yang selaras dengan Visi-Misi Kepala Daerah, dan juga APBD. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas, dan karakter kota, *Masterplan Muara Enim Smart Regency* juga dimaksudkan untuk mempermudah bukan hanya pemerintah, namun juga warga, entitas bisnis, dan semua stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan inovasi dan menjadi bagian dari perubahan.



1.2 Maksud dan Tujuan

Bagaimanapun juga proses pembangunan *Smart Regency* merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidak seketika, hal ini dikarenakan pada tahap-tahap tertentu usaha pembangunan smart regency juga perlu melibatkan semua pihak di tingkat daerah dalam hal ini di Kabupaten Muara Enim maupun tingkat pusat, baik dari warga, pemerintah, swasta, maupun stakeholder lainnya. Selain untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi, hal ini juga dimaksudkan untuk menyamakan (*alignment*) pemahaman akan visi, misi, dan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari setiap pihak serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) atas rencana pembangunan *smart regency* yang diinisiasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFO SP) Kabupaten Muara Enim sepenuhnya menyadari bahwa pembangunan *smart regency* merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen Masterplan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dan alat bantu bagi pemerintah daerah, tim penggerak dan pendamping, serta entitas lain yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan Kabupaten Muara Enim berdasarkan konsep *Smart Regency*.

Adapun tujuan dari disusunnya Masterplan Muara Enim *Smart Regency* adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung ketercapaian Visi-Misi MEMBARA dan program strategis;
- b. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan *Smart Regency* di tingkat pusat dan tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Muara Enim;
- c. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan Kabupaten Muara Enim berdasarkan konsep *Smart Regency*;
- d. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD 2025-2029 dalam dokumen perencanaan Muara Enim *Smart Regency*;
- e. Mendorong proses pengembangan Kabupaten Muara Enim sebagai kabupaten cerdas (*smart regency*) yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.



1.3 Sasaran

Adapun sasaran dari disusunnya Masterplan Muara Enim *Smart Regency* antara lain:

1. Menyediakan panduan perencanaan pengembangan Kabupaten Muara Enim berdasarkan 6 dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*).
2. Menyusun prioritas pembangunan Muara Enim *Smart Regency* dalam jangka pendek dan jangka menengah.
3. Terlaksananya program Muara Enim *Smart Regency* sesuai dengan masterplan yang telah disusun termasuk program *Quick Win* dalam 1 tahun kedepan.
4. Membantu pemerintah daerah dalam tata pamong (*governance*) dan tata kelola (manajemen) pengembangan *Smart Regency* sehingga dapat berlangsung secara sistematis, transparan, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam revisi *Masterplan Smart Regency (2026-2029)* ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
9. Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;



14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2019 tentang Master Plan Muara Enim *Smart Regency*
15. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Muara Enim;
16. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

1.5 Kerangka Pikir *Smart City/Smart Regency*

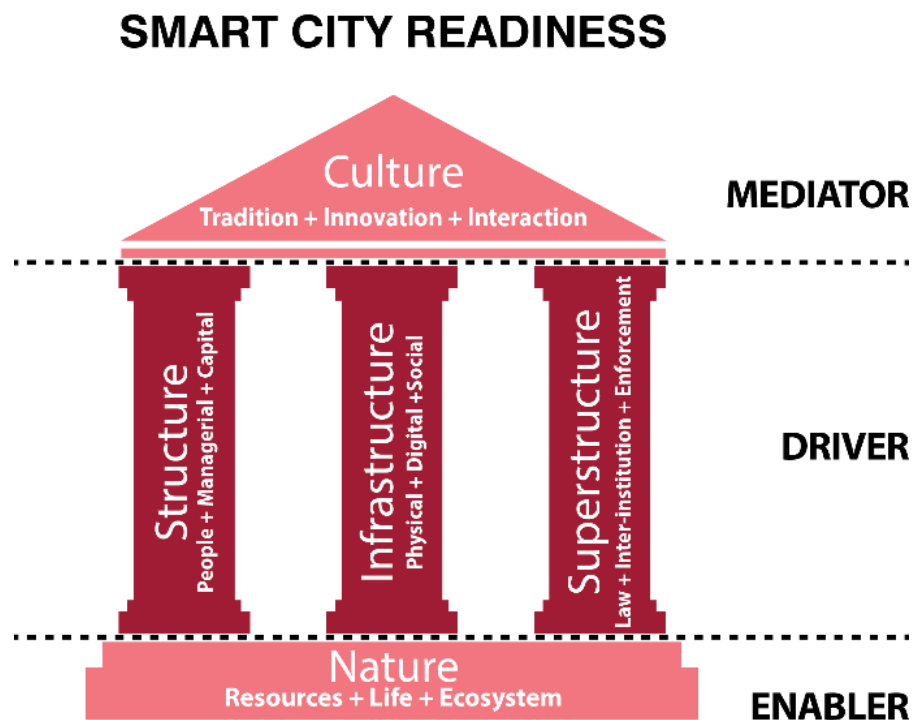
Lembaga-lembaga seperti Smart Cities Council, IBM, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE adalah beberapa organisasi yang telah lama mengkaji dan mengembangkan kerangka pikir (*frameworks*) Smart City atau Daerah Pintar. Masing-masing lembaga memiliki istilah dan penekanan berbeda dalam pengembangan konsep smart city ini. Istilah-istilah yang sering muncul misalnya *sustainable city*, *green city*, *digital city*, dan *smart region*. Keberagaman kerangka pikir (*frameworks*) yang ada seringkali membuat kebingungan bahkan perdebatan di kalangan lembaga akademis, pelaku smart city, maupun pemerintah daerah di Indonesia dalam menentukan kerangka pikir (*frameworks*) yang paling sesuai dengan identitas dan karakter Indonesia. Hal ini mendorong beberapa lembaga think tank nasional untuk merumuskan kerangka pikir (*frameworks*) yang sesuai dengan konteks keindonesian, framework yang telah lazim digunakan dan dipandang paling sesuai dengan dinamika nasional adalah framework yang digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Indonesia dalam Gerakan Menuju 100 Smart City Daerah. Kerangka pikir (*frameworks*) ini dikembangkan lembaga *think-tank* dan pelopor pengembangan smart city yaitu Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) merumuskan bahwa dalam membangun Smart City, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Adapun elemen-elemen penyusunnya yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan



Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

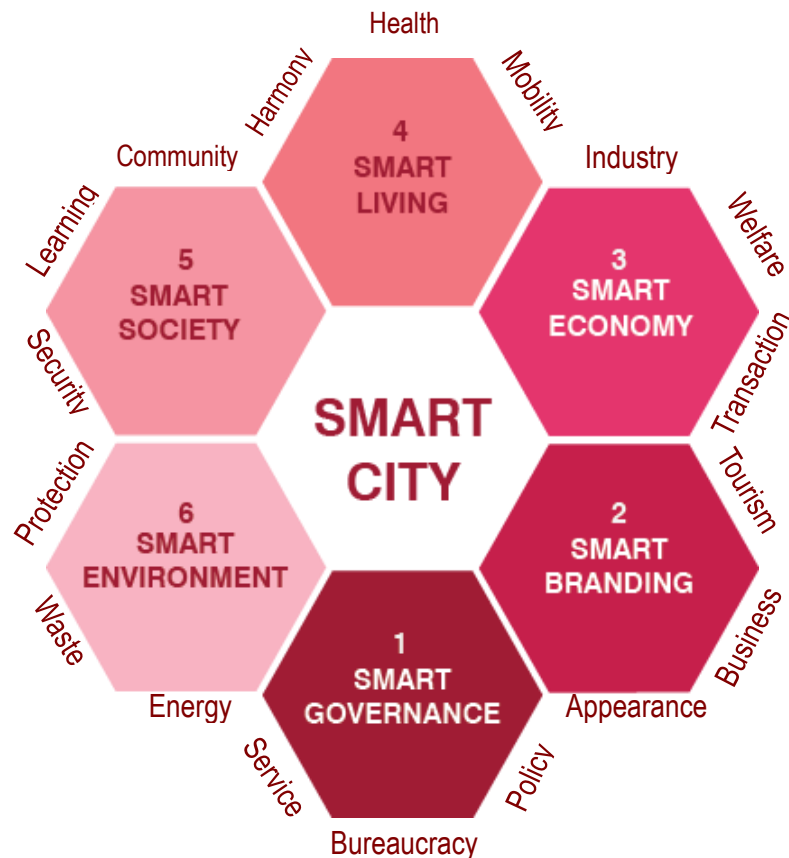
- **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.



Gambar 1.1 Elemen Smart City Readiness
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah *Smart City* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* itu sendiri.





Gambar 1.2 Dimensi Smart City
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

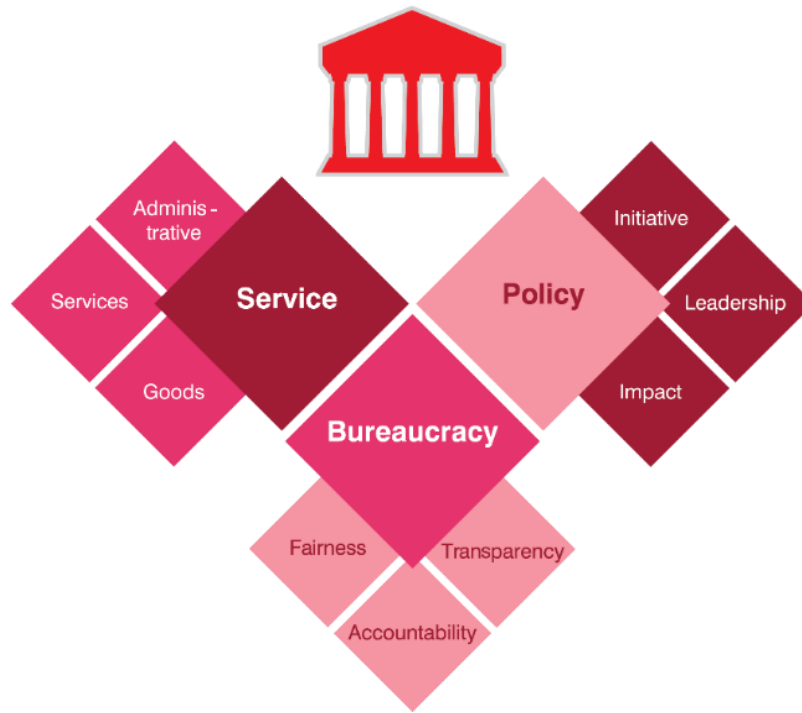
1. *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.



SMART GOVERNANCE



Gambar 1.3 Smart Governance

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. Smart Governance harus dapat dimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

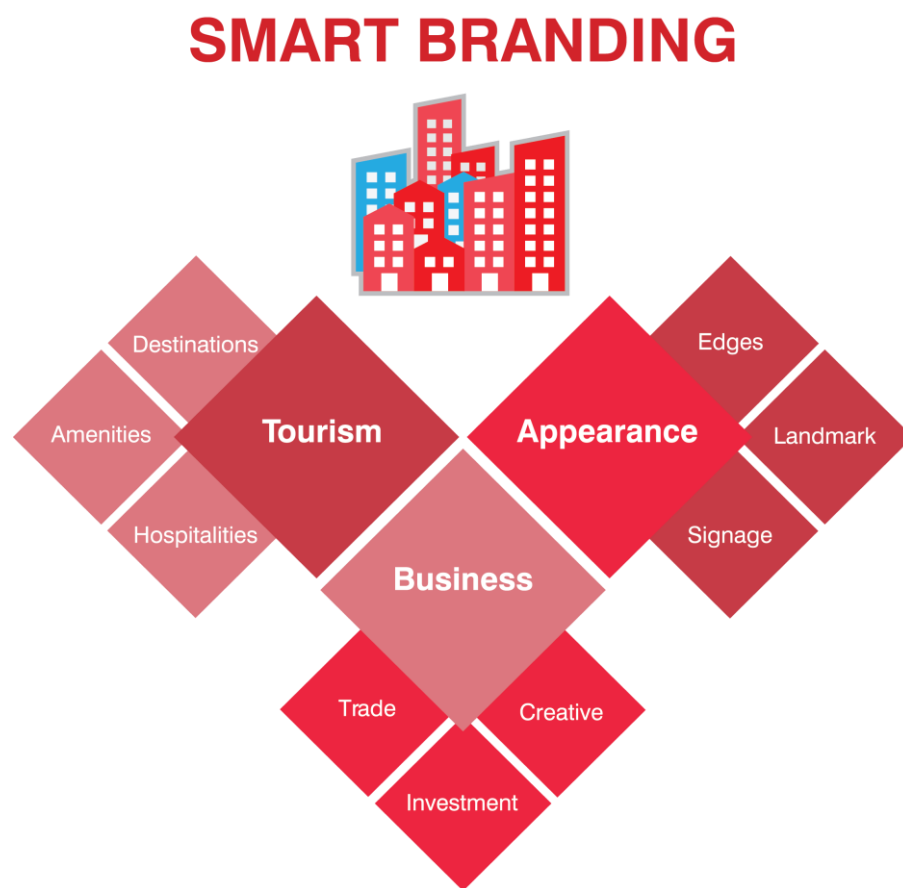
2. *Smart Branding*

Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding



korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.4 Smart Branding
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

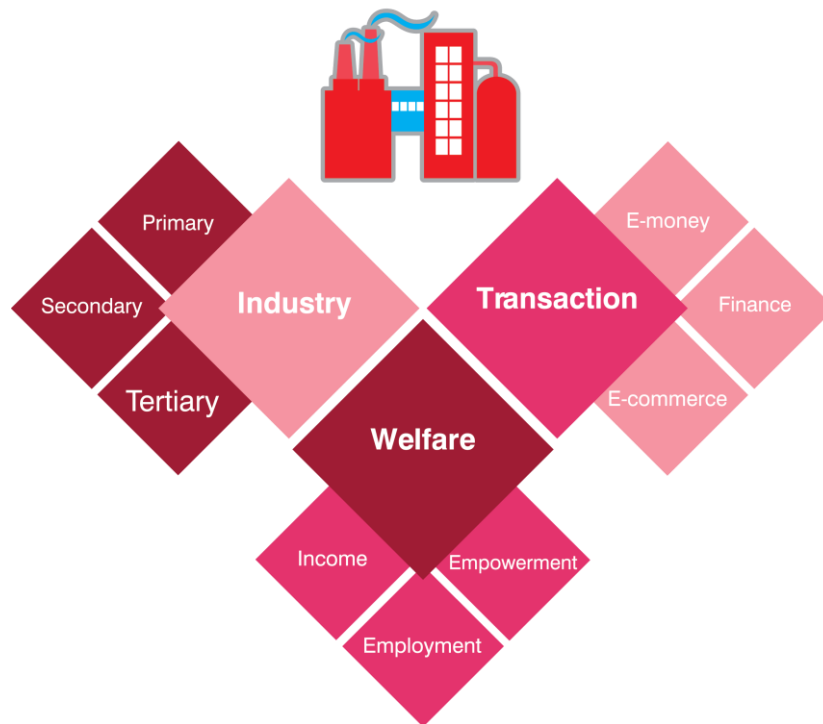
Sasaran dari *smart branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

3. *Smart Economy*

Smart economy dalam dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.



SMART ECONOMY



Gambar 1.5 Smart Economy

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

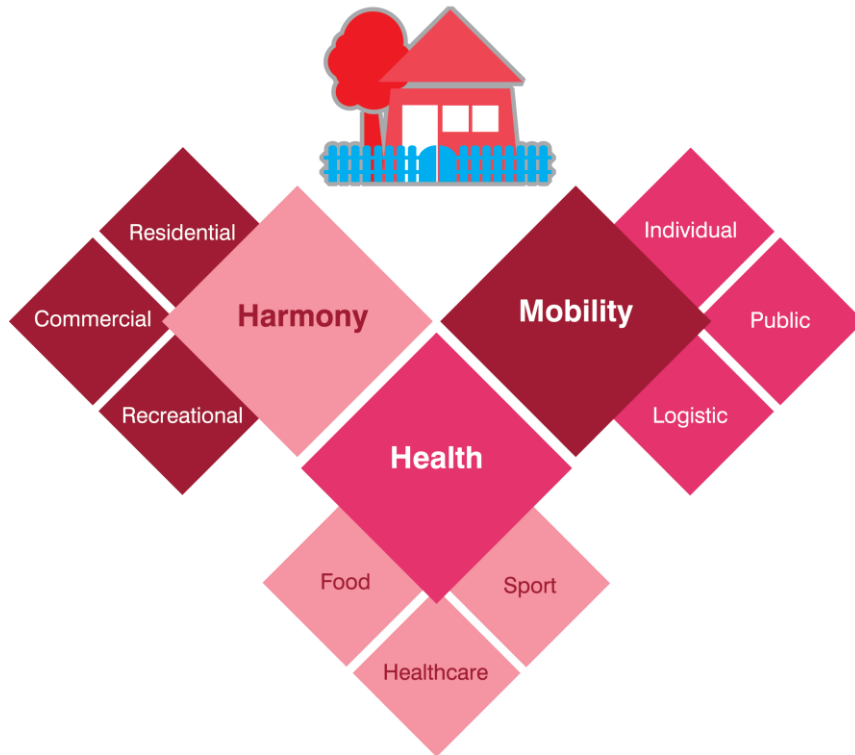
Sasaran dari dimensi *smart economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

4. *Smart Living*

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu: kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*.



SMART LIVING



Gambar 1.6 Smart Living

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

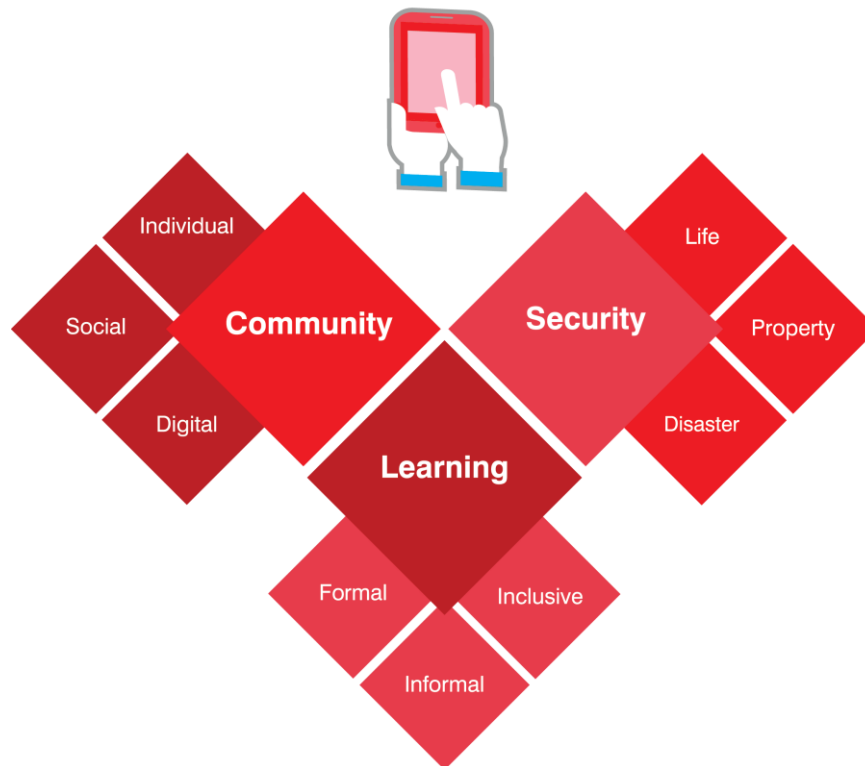
5. *Smart Society*

Smart society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam *sebuah Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari *smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *smart society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).



SMART SOCIETY



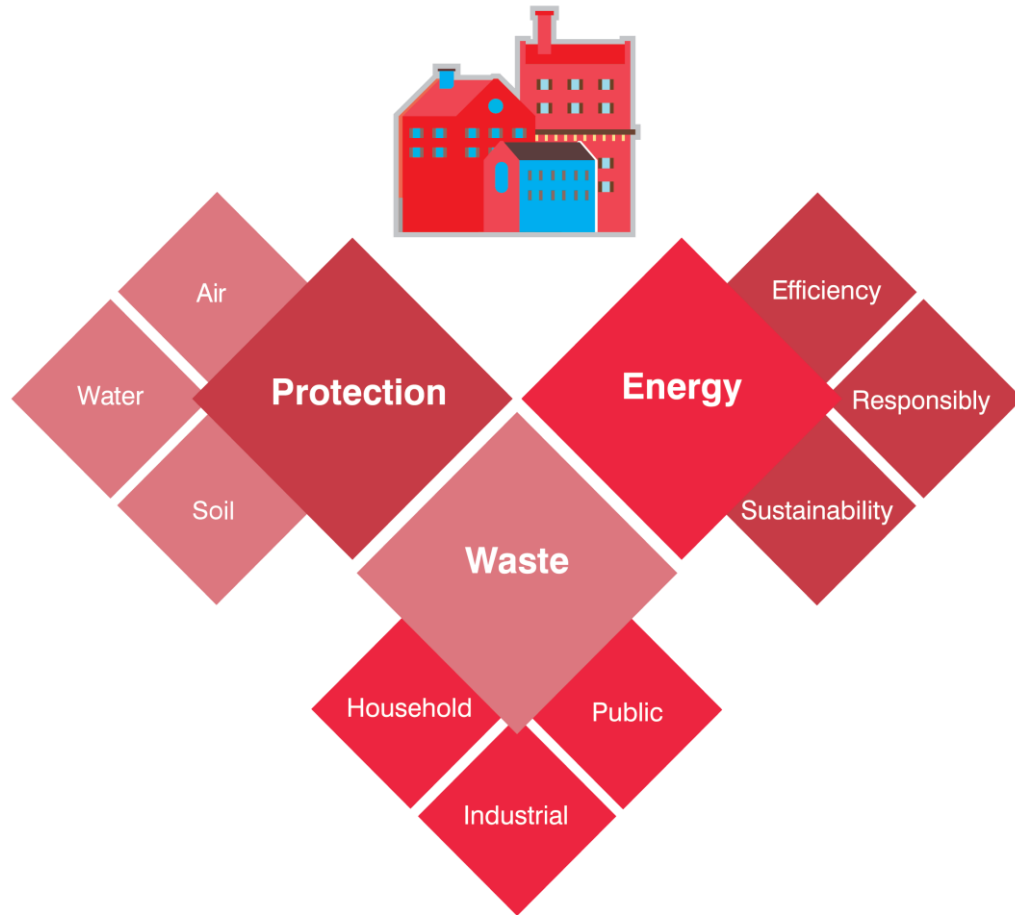
Gambar 1.7 Smart Society
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

6. *Smart Environment*

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari smart environment di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.



SMART ENVIRONMENT



Gambar 1.8 Smart Environment
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *smart environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.



BAB 2

ANALISIS STRATEGIS

PEMERINTAH DAERAH

2.1 Hasil Kajian Internal Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah serta analisa terhadap kebijakan pembangunan yang harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 (dapat dilihat secara detil dalam buku I), dapat disimpulkan isu strategis pembangunan Kabupaten Muara Enim dalam 5 tahun ke depan yaitu:

1. Tingginya kemiskinan dan ketimpangan

Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi isu pembangunan global seperti SDGs yang menempatkan menjadi goals pertama, selanjutnya Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.

Sementara itu, Asta Cita menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, penguatan daya saing daerah tertinggal, serta peningkatan keadilan sosial melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, yang relevan baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.

Selain kemiskinan, ketimpangan masih menjadi masalah pembangunan. Kue pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kalangan, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Lebih lanjut, ketimpangan gender juga masih menjadi masalah, indeks ketimpangan gender jauh di atas nilai Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia, artinya masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

2. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM

Isu rendahnya kualitas dan daya saing SDM tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, isu ini pun masuk menjadi isu strategis dalam dokumen perencanaan lain baik



nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan. Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu pemicu masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM.

Pada bidang pendidikan, tingkat partisipasi dan akses terhadap pendidikan masih cukup rendah tercermin dari angka APK dan APM terutama pada jenjang pendidikan menengah. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar daerah, pemerataan jumlah sekolah serta harus mulai berorientasi pada kualitas. Selanjutnya masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Muara Enim pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, meningkatnya angka kematian ibu, bayi dan balita, masih ditemukan anak bergizi buruk atau stunting. Pemerataan sarana dan prasarana serta sumber daya kesehatan perlu untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Muara Enim masih memiliki kualitas dan daya saing yang rendah, tercermin dari mayoritas angkatan kerja hanya berpendidikan $\leq$ Sekolah Dasar (SD) dengan keterampilan seadanya. Dengan karakteristik seperti ini, sulit untuk bisa bersaing sehingga lebih banyak terserap di pekerjaan informal atau bahkan menjadi pengangguran.

3. Degradasi lingkungan, resiliensi bencana dan perubahan iklim

Isu lingkungan menjadi isu sentral dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik menengah maupun panjang, menurunnya kualitas lingkungan dapat memberikan dampak besar dalam pembangunan, meningkatkan ancaman bencana, ketersediaan pangan dan tentu saja berdampak pada perekonomian.

Dengan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor primer/ekstraktif akan berimplikasi serius terhadap lingkungan hidup dan kerentanan terhadap bencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun menjadi tulang punggung perekonomian namun dampak ekologis dan sosialnya sangat besar jika tidak dikelola secara berkelanjutan.

Secara lingkungan, kegiatan pertambangan dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan tutupan lahan, dan pencemaran tanah, air, serta udara. Aktivitas penggalian dan pengupasan



lahan dalam skala besar seringkali menghilangkan vegetasi alami yang berfungsi sebagai penyangga ekologis. Hal ini menyebabkan terganggunya siklus hidrologi, meningkatnya erosi dan sedimentasi, serta penurunan kualitas air akibat limbah bahan kimia dan logam berat dari tambang. Selain itu, eksploitasi tambang seringkali tidak memperhatikan pemulihan lahan pasca-tambang, yang memperparah degradasi lingkungan dalam jangka panjang.

Dari sisi kebencanaan, degradasi lingkungan akibat pertambangan dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Misalnya, daerah yang telah kehilangan fungsi hutan dan penutup lahan cenderung tidak mampu menyerap air hujan, sehingga air mengalir langsung ke permukaan dan memicu banjir bandang. Sementara itu, perubahan kontur lahan karena penambangan meningkatkan risiko longsor, terutama di daerah lereng atau perbukitan. Selain itu, keberadaan lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka dapat menjadi titik rawan genangan dan memperparah dampak bencana.

4. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan, dalam konteks ini reformasi birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani, sehingga mampu mendorong efisiensi pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ada lima hal yang mengharuskan peningkatan kinerja pada reformasi birokrasi yaitu: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong tata kelola yang baik (*Good Governance*), menjamin profesionalisme dan kompetensi ASN, menjadi kunci pencapaian pembangunan daerah dan nasional dan mendukung capaian agenda strategis.

5. Ekonomi belum mandiri dan berkeadilan

Perekonomian yang bertumpu pada *brown energy* terutama sektor energi fosil seperti batubara dan minyak bumi menyimpan risiko struktural yang cukup dalam terhadap keberlanjutan dan ketahanan ekonomi daerah. Dalam jangka pendek, sektor ini memang menjanjikan pemasukan besar melalui pajak, retribusi, royalti, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun secara ekonomi makro, model ekonomi ekstraktif seperti ini cenderung menciptakan ketergantungan tinggi terhadap satu jenis komoditas yang sangat rentan



terhadap fluktuasi harga pasar global. Fenomena *commodity boom and bust* sangat mungkin terjadi, di mana ketika harga batubara tinggi, pendapatan daerah melonjak drastis, tetapi saat harga anjlok, APBD ikut terguncang. Situasi ini menyebabkan instabilitas fiskal dan mengganggu kesinambungan belanja pembangunan.

Lebih dalam lagi, sektor ekstraktif cenderung memiliki *capital intensive economy* yakni padat modal dan minim penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini menciptakan paradoks ekonomi: daerah kaya sumber daya alam, namun tingkat pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Selain itu, nilai tambah dari sektor ini sebagian besar tidak dinikmati secara lokal karena rantai nilai industri seperti pengolahan, logistik, dan ekspor lebih banyak terkonsentrasi di luar daerah, bahkan luar negeri. Akibatnya, efek *multiplier* ke sektor-sektor ekonomi lain sangat terbatas. Model ini juga menghambat proses diversifikasi ekonomi dan menjadikan struktur ekonomi daerah kurang tangguh terhadap guncangan eksternal.

Ditengah transformasi ekonomi global menuju transisi energi dan ekonomi hijau, ketergantungan pada *brown energy* menempatkan daerah dalam posisi yang makin terpinggirkan. Investor dan mitra dagang internasional mulai mensyaratkan praktik ESG (*Environmental, Social, and Governance*), yang sulit dipenuhi oleh sektor batubara dan migas. Hal ini tidak hanya mengancam hilangnya sumber-sumber investasi ke depan, tetapi juga mempersulit daerah dalam mengakses insentif pembiayaan hijau (*green financing*) dan pasar ekspor yang mensyaratkan *carbon footprint* rendah. Bila daerah tidak segera merespons perubahan ini, maka risiko *stranded assets* yakni aset-aset ekonomi yang tiba-tiba kehilangan nilai karena regulasi transisi energi akan semakin nyata. Mesin pertumbuhan yang selama ini diandalkan bisa menjadi beban ekonomi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan strategi diversifikasi ekonomi secara terencana dan terukur. Sektor-sektor ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal seperti pertanian berkelanjutan, perikanan, pariwisata berbasis alam, industri hilirisasi non ekstraktif, serta ekonomi digital perlu diperkuat. Selain itu, investasi dalam pendidikan vokasional dan riset inovasi menjadi prasyarat untuk menciptakan human capital yang mampu bergerak ke sektor-sektor baru yang lebih hijau dan inklusif. Menggeser struktur ekonomi dari *brown economy* menuju *green and resilient economy* bukan hanya penting dari sisi lingkungan, tetapi juga strategis untuk menjamin daya saing daerah dalam lanskap ekonomi nasional dan global yang semakin menekankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan ketangguhan ekonomi.



Selain itu, dalam banyak kasus, daerah yang kaya sumber daya alam justru menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam nilai *Gini Ratio* yang stagnan atau bahkan memburuk. Fenomena ini mencerminkan bahwa manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam tidak tersebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pemilik modal besar dan pelaku industri, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan bagian kecil dari rantai nilai, sering kali dalam bentuk pekerjaan informal, berisiko tinggi, dan berupah rendah.

6. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang belum merata dan berkeadilan

Isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang belum merata serta belum berkeadilan merupakan tantangan mendasar dalam konteks pembangunan daerah. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan akses, kualitas, dan hasil dari pembangunan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dalam satu daerah. Banyak daerah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan, terutama di wilayah pedesaan, perbatasan, kawasan terpencil, dan komunitas adat terpencil. Sementara itu, wilayah perkotaan atau pusat administrasi cenderung lebih maju karena lebih banyak memperoleh intervensi pembangunan, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun pelayanan publik.

Dalam konteks infrastruktur pelayanan dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, dan fasilitas kesehatan masih banyak desa dan kecamatan di daerah yang mengalami keterbatasan akses atau bahkan belum terlayani secara layak. Misalnya, ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu belum sebanding dengan kebutuhan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Demikian pula, kualitas pendidikan terganggu oleh minimnya sarana prasarana sekolah, rendahnya angka partisipasi sekolah menengah, serta distribusi guru yang tidak merata.

Ketimpangan infrastruktur juga berdampak pada produktivitas ekonomi masyarakat. Wilayah yang memiliki konektivitas jalan yang buruk akan terhambat dalam mengakses pasar, mendapatkan layanan publik, atau memobilisasi hasil produksi. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi lokal yang tidak inklusif dan meningkatkan kesenjangan antarwilayah.



2.2 Analisa PESTEL

Analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum) sangat relevan dan bermanfaat bagi pemerintah daerah. Meskipun awalnya dikembangkan untuk dunia bisnis, kerangka kerja ini telah banyak diadaptasi oleh sektor publik untuk memetakan pengaruh faktor eksternal dalam perumusan kebijakan dan perencanaan strategis. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa analisis PESTEL cocok untuk diterapkan di suatu pemerintah daerah:

- a. **Penyusunan Rencana Strategis (Renstra):** Membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi dan permasalahan daerah guna menyusun dokumen perencanaan jangka menengah seperti Renstra Perangkat Daerah periode 5-10 tahunan.
- b. **Identifikasi Isu Strategis:** Digunakan untuk mengevaluasi tantangan di masa depan, seperti dalam transformasi kota pintar (*smart city*) atau pengembangan sektor tertentu seperti pariwisata daerah.
- c. **Manajemen Risiko:** Memberikan gambaran dampak kebijakan luar (seperti kebijakan fiskal nasional atau hukum lingkungan terbaru) terhadap stabilitas operasional dan fiskal daerah.
- d. **Adaptasi Perubahan:** Membantu pemimpin daerah lebih tegas dalam membuat keputusan karena didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap tren sosial dan perkembangan teknologi terbaru.

Terdapat beberapa contoh komponen dalam analisis PESTEL di sektor publik:

- **Politik:** Hubungan dengan pemerintah pusat, stabilitas politik lokal, dan pengaruh kebijakan nasional.
- **Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, dan daya beli masyarakat.
- **Sosial:** Demografi, tingkat pendidikan masyarakat, serta tren budaya dan perilaku sosial.
- **Teknologi:** Ketersediaan infrastruktur digital dan adopsi *e-government* dalam layanan publik.
- **Lingkungan:** Kebijakan pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan isu perubahan iklim di wilayah tersebut.
- **Hukum:** Peraturan daerah (Perda), hukum ketenagakerjaan, serta regulasi standar pelayanan minimal.



Berikut ini disajikan analisa PESTEL untuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim selama 5 tahun mendatang, yang disarikan dari beberapa data utama seperti RPJP, RPJMD, Kebijakan Kepala Daerah, dan sumber-sumber lainnya:

P – Political (Politik)

Secara politik-kebijakan, periode 2025-2030 ditandai oleh penegasan instrumen pengelolaan sektor minerba oleh pemerintah pusat: kewajiban prioritas pemenuhan pasar domestik (DMO); penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) merupakan instrumen krusial dalam pengendalian ruang dan sumber daya alam.; serta perluasan partisipasi entitas (BUMN/BUMD, swasta, koperasi, entitas berbasis keagamaan) dalam perizinan dan pengusahaan. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi multi-level untuk memastikan konsistensi perizinan, pengawasan, dan kebermanfaatan untuk warga dan produk lokal.

Dalam konteks perencanaan daerah, RPD 2024–2026 (melalui Perbup No.4/tahun 2023) menjadi batu pijakan menuju RPJMD 2025–2029 dengan tema “pemantapan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing daerah” (selaras dengan visi MEMBARA). Sinkronisasi kebijakan pusat-provinsi-kabupaten diformalkan melalui Musrenbang RKPD 2026 dan penyusunan RPJMD, sehingga analisis PESTEL ini dapat menjadi Bab Analisis Lingkungan Strategis yang mengarahkan program lintas-OPD secara terukur

Arah kebijakan yang direkomendasikan dapat mencakup: pembentukan Gusus Tugas Terkait Minerba Daerah (melalui koordinasi dan kerjasama antara Bappeda, DPMPTSP, DLH, Dishub, ESDM Provinsi) untuk merespons cepat atas dinamika regulasi; Melakukan penandatanganan DMO (*Domestic Market Obligation*) yaitu: kewajiban bagi produsen sumber daya alam (seperti batu bara, nikel, atau minyak) untuk memasok sebagian hasil produksinya ke pasar domestik dengan harga tertentu dan hilirisasi (kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dengan mengolahnya di dalam negeri (smelter, pemurnian) daripada mengeksport bahan mentah) antara pemda dan pemerintah pusat dengan pelaku tambang besar (misalnya: PT. Bukit Asam atau tambang lainnya) untuk memastikan kebermanfaatan untuk warga lokal; serta integrasi program CSR strategis ke prioritas RPJMD (pendidikan, kesehatan, lingkungan).



E – *Economic* (Ekonomi)

Perekonomian Muara Enim memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya alam berbasis pertambangan batubara. Kontribusi sektor ini dalam PDRB masih dominan walau menunjukkan tren penurunan relatif, namun tetap menjadi motor pertumbuhan (termasuk rekor laju pertumbuhan kabupaten di tingkat provinsi). Di bagian hilir, PTBA mencatat penjualan 42,9 juta ton (2024) dan mengincar peningkatan kapasitas produksi/transportasi, selaras dengan target produksi batubara Sumsel (105–110 juta ton pada 2024). Agenda jalan khusus pengadaan jalan khusus kendaraan batubara di tingkat kabupaten diposisikan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi beban jalan umum, disamping optimalisasi kereta api.

Di saat yang sama, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2 (55 MW) yang tersinkronisasi 2025 menambah kapasitas panas bumi area Lumut Balai menjadi 110 MW dan berpotensi menghasilkan ± 481 GWh/tahun, menghadirkan jangkar energi bersih bagi investor industri hijau dan peluang penurunan emisi hingga 280 ribu ton CO₂/tahun. Peran ini strategis untuk diversifikasi PDRB dan penataan portfolio investasi yang lebih tahan terhadap siklus harga komoditas.

Adapun kebijakan ekonomi yang disarankan untuk 2026–2029 berdasarkan hasil telaah dari RPJMD adalah: diversifikasi ekonomi melalui agro-processing (kopi Semendo, karet, sawit berkelanjutan), logistik/ pergudangan, dan ekowisata geoenergi (heritage tambang, geothermal trail), percepatan jalan khusus batubara dengan standar keselamatan dan mitigasi sosial-lingkungan, strategi penarikan investasi hijau dengan memanfaatkan kepastian pasokan listrik panas bumi sebagai green load (penyedia energi yang ramah lingkungan).

S – *Social* (Sosial)

Pada demografi Muara Enim dalam RPJMD 2025-2029 menunjukkan proporsi usia produktif berkisar 65% (15–59 tahun) dari total penduduk (berkisar 645–654 ribu) pada tahun (2024–2025). Hal ini merupakan suatu bonus demografi yang dapat digerakkan melalui reskilling ke sektor non-tambang, layanan publik digital, dan manufaktur ringan. Kekuatan sosial ini perlu diimbangi oleh peningkatan kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih) dan proteksi sosial adaptif bagi komunitas rentan, khususnya di bantaran sungai (Aur, Lematang, Musi) yang kerap terdampak banjir.

Akan tetapi, terjadi risiko sosial utama berhubungan dengan keselamatan kerja di wilayah industri tambang, paparan banjir yang berulang, dan potensi penurunan kualitas



lingkungan (air/sanitasi) yang mengganggu produktivitas akibat eksplorasi/eksploitasi yang tidak terkontrol. Untuk itu, pemerintah daerah disarankan perlu mengembangkan Akademi Vokasi Energi & Logistik, kemitraan dengan PTBA/PGEO dan SMK/Politeknik untuk kurikulum operator PLTP, keselamatan dan kesehatan dalam industri, manajemen logistik, GIS/IoT, serta menyiapkan mekanisme bantuan cepat (*shock-responsive social protection*) saat terjadi banjir.

T – Technological (Teknologi)

Kabupaten Muara Enim telah memiliki Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart Regency* (No.36 Tahun 2019) ber-visi “Nyaman, Berdaya Saing, Lestari”, dan telah mengikuti evaluasi Smart City tahap II (2024). Penggunaan aplikasi “Muara Enim Dulur Kito” menjadi kanal *e-ticket* dan SOS untuk layanan tertentu, telah menunjukkan kesiapan ekosistem digital daerah. Di level infrastruktur, Palapa Ring dan inisiatif Palapa Ring Integrasi/SATRIA-1 memperluas konektivitas internet untuk fasilitas publik, sekolah, dan desa. Hal ini menjadi landasan penting bagi penerapan menuju Satu Data Daerah-Satu Data Indonesia dan *interoperability* dalam layanan *smart governance*.

Sehingga untuk implementasi dalam tahun 2026–2029, diarahkan Smart Regency 2.0 dengan tiga fokus:

- *Smart governance*: konsolidasi Satu Data (RPJMD, RKPD, perizinan, kebencanaan) dan open data dashboard;
- *Smart mobility*: sistem ATCS dan freight routing untuk angkutan batubara agar mengurangi konflik penggunaan jalan umum; dan
- *Smart environment*: sensor kualitas air Sungai Enim, AQI dan early warning banjir terintegrasi, yang ditayangkan pada dashboard publik. Kebijakan ini perlu ditopang oleh program literasi digital ASN/masyarakat untuk menutup gap kapasitas yang masih tampak pada implementasi *smart governance*.

E – Environmental (Lingkungan)

Kualitas air Sungai Enim menunjukkan status “tercemar ringan” (tahun 2018–2023) pada beberapa parameter (terdapat kandungan TSS, DO, Fe, Cu, oil & grease). Kondisi ini menuntut perbaikan pengelolaan limbah (industri/rumah tangga), pengendalian *run-off*, dan *real-time monitoring* pada titik kritis. Di saat bersamaan, banjir berulang (kejadian tahun 2024 & 2025) akibat hujan lebat dan luapan sungai Aur/Lematang/Musi mengindikasikan



pentingnya adaptasi iklim dan penataan ruang berbasis risiko. Sebagai penyeimbang, hadirnya PLTP Lumut Balai yang memperkuat bauran energi bersih dan pengurangan emisi di wilayah.

Sehingga diberikan rekomendasi kebijakan tahun 2026–2029:

- Program “Sungai Enim Sehat”, pemasangan sensor (DO, TSS, Fe/Cu), audit limbah, sanksi & insentif kepatuhan, dan pelaporan publik;
- *Nature-based solutions* (NBS), restorasi riparian, pembuatan berbagai kolam retensi, pembangunan *infiltration trench*, dan penataan ruang yang sensitif terjadi banjir;
- Ekonomi karbon lokal, bundling proyek PLTP dengan rehabilitasi daerah aliran sungai untuk pengurangan emisi berbasis komunitas.

L – Legal (Hukum)

Pada bagian ini, adanya kerangka hukum nasional sektor minerba memasuki fase pengetatan & reformasi melalui UU No.2 Tahun 2025 (Amandemen ke-4 tentang Undang-Undang Minerba), yang menegaskan prioritas pemanfaatan domestik, penataan perizinan & wilayah usaha, serta kemitraan yang lebih inklusif. Hal ini berdampak pada kesiapan regulasi daerah di bidang RTRW, perizinan jalan khusus, pengawasan lingkungan, dan pengelolaan kualitas air, yang perlu di-harmonisasi agar selaras dengan mandat nasional dan mengurangi risiko sengketa. Di Muara Enim, melalui RPD 2024–2026 dan proses RPJMD 2025–2029 menjadi payung hukum perencanaan jangka menengah; sementara Masterplan Smart Regency (Perbup No.36 Tahun 2019) menjadi dasar inovasi tata kelola digital yang lebih transparan, efektif, dan efisien. Sehingga diberikan beberapa rekomendasi terkait legal 2026–2029:

- Harmonisasi Perda/Perbup yang telah ada terkait RTRW, proses perizinan tambang, pembangunan jalan khusus batubara, pengawasan kualitas air/limbah;
- Penyisipan klausul manfaat lokal (*local content & local hiring*) dalam izin/kesepakatan;
- Mekanisme mediasi administrasi untuk penyelesaian sengketa perizinan/lingkungan lebih cepat.

Analisis PESTEL tahun 2026–2029 untuk Kabupaten Muara Enim menunjukkan peluang besar dalam hilirisasi, peningkatan digitalisasi layanan, dan pengembangan energi bersih berbasiskan panas bumi, bersamaan dengan tantangan nyata berupa penyesuaian dan penguatan tata kelola serta regulasi minerba, pengendalian dampak lingkungan, dan



peningkatan resiliensi kebencanaan. Dengan koordinasi lintas-level yang kuat, harmonisasi regulasi, serta investasi pada kapasitas SDM dan infrastruktur digital-lingkungan, pemerintah daerah dapat menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Mengurangi risiko hidrometeorologi dan memulihkan ekosistem sungai melalui NBS, monitoring real-time, serta proteksi sosial adaptif untuk komunitas terdampak. Mengakselerasi literasi & kapasitas digital ASN/masyarakat agar implementasi smart governance berjalan efektif dan inklusif.



BAB 3

PETA JALAN

MUARA ENIM *SMART REGENCY*

3.1 Visi Presiden Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Ir. Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah menetapkan visi/arahan pembangunan nasional yang berfokus pada kedaulatan pangan, energi, lingkungan, dan ekonomi rakyat. Visi ini adalah fondasi untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, sehingga haruslah menjadi suatu acuan dasar dalam melengkapi semua kebijakan yang diambil oleh para Kepala Daerah di seluruh Indonesia selama masa jabatannya.

1. Penyelesaian masalah sampah terpadu.

Menetapkan target penuntasan masalah sampah di seluruh Indonesia pada tahun 2029, melalui berbagai strategi hulu–hilir termasuk penguatan TPS3R, TPST, serta pengembangan skema *Waste-to-Energy (WTE)* dan *Refuse-Derived Fuel (RDF)*.

Sesuai dengan RPJMN 2025–2029, Presiden telah memimpin rapat terbatas bersama seluruh menteri agar Pemerintah Daerah lebih proaktif mengelola sampah sesuai Undang-Undang No. 18/2008.

2. Kebersihan wilayah sebagai modal pariwisata dan devisa.

Membahas strategi “bersih-bersih wilayah” yang dimulai dari desa hingga kota, sebagai bagian dari upaya menumbuhkan devisa melalui pariwisata. Direkomendasikan kerja sama dengan perguruan tinggi (rektor dan dekan) guna menyusun masterplan kawasan bersih, asri, dan estetis di tiap wilayah.

3. Adaptasi krisis iklim dan daya dukung lingkungan.

Setelah insiden bencana besar di beberapa daerah Indonesi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan kepala daerah untuk mengantisipasi dampak krisis iklim, melalui monitoring kapasitas lingkungan serta peningkatan edukasi lingkungan di sekolah-sekolah. Kebijakan ini mendorong daerah merancang langkah mitigasi dan adaptasi berdasarkan daya dukung hidrologi dan ekosistem lokal.

4. Energi terbarukan dan ketahanan energi nasional.



Dalam pidato kenegaraan RAPBN 2026, Presiden Prabowo menegaskan arah APBN untuk memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan kapasitas migas, subsidi energi, dan transisi masif ke Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan target 100 % pembangkit listrik nasional dari EBT dalam 10 tahun. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program listrik desa, PLTS atap, bioenergi, serta partisipasi dalam pengembangan energi hijau berbasis sumber daya lokal.

5. Ketahanan pangan dan energi desa.

Dalam APBN 2026, telah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk subsidi pupuk, pengembangan lumbung pangan, stabilisasi harga, serta modernisasi pertanian, dengan tujuan swasembada beras dan jagung. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengimplementasikan program ini melalui penguatan BUMDes, gapoktan, dan mekanisme distribusi pupuk, agar manfaat mencapai wilayah paling ujung.

6. Peningkatan kualitas pendidikan, gizi, dan energi hijau.

Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat alokasi Rp335 triliun untuk mencukupi kebutuhan gizi 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita; dikaitkan pengembangan UMKM lokal—termasuk energi hijau dan pangan desa. Pendidikan bermutu disokong dana Rp757,8 triliun, diwajibkan integrasi kurikulum lingkungan, adaptasi iklim, dan literasi energi bersih di sekolah-sekolah, sesuai arahan prioritas nasional.

7. Kemandirian desa dan ekonomi hijau.

Presiden menekankan “membangun dari desa” sebagai prioritas, mendukung ekonomi hijau, biru, dan digital di desa/kelurahan lewat program koperasi dan pemberdayaan UMKM desa. Kepala daerah diminta memfasilitasi pembentukan koperasi desa, pengelolaan lingkungan berbasis desa, serta mengawasi penggunaan dana desa dalam kerangka *smart city*.

8. *Smart City* dan infrastruktur digital lingkungan

Presiden mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional, termasuk pusat data hijau, untuk mendorong *smart city* berbasis enam pilar, termasuk environment. Pemerintah daerah diinstruksikan menyusun *Smart City* lokal, mengadopsi indikator lingkungan (kualitas udara–air, kawasan hijau, pengelolaan limbah), serta mengintegrasikan *masterplan smart regency*.



3.2 Visi, Misi, dan Program Kabupaten Muara Enim

3.2.1 Visi Kabupaten Muara Enim

Visi merupakan pernyataan umum mengenai kondisi ideal yang diharapkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga berfungsi sebagai panduan arah pembangunan atau proyeksi kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (kejelasan arah), yang secara spesifik menanggapi permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu-isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi aktual, permasalahan, dan tantangan Pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2029, yaitu:



Gambar 3.1 Visi Kabupaten Muara Enim

Adapun penjelasan atas tagline tersebut adalah:

- **Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera** atau **MEMBARA** adalah Seluruh Pemangku Kepentingan yang satu tekad secara Bersama mengejar ketertinggalan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Muara Enim.
- **Bangkit** adalah ajakan untuk seluruh komponen masyarakat yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Muara Enim mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor.
- **Sejahtera** adalah Masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara berimbang jasmani dan rohani, meningkat perlindungan sosial, kualitas hidup dan lingkungannya, juga mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya, serta meningkatkan kemandirian fiskal untuk percepatan pembangunan daerah.



- **Maju** adalah terus mengalami kemajuan pembangunannya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, mengandalkan hilirisasi dan nilai tambah pertanian, pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata, memiliki keunggulan dan mampu berkompetisi dengan daerah lain, ditandai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, pengembangan inovasi daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya daerah.
- **Berkelanjutan** adalah berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan ekonomi sosial berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna menjaga kelestarian lingkungan.

3.2.2 Misi Muara Enim

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2025-2029, akan dicapai melalui Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif;
3. Meningkatkan Infrastruktur dan Supratruktur Dasar yang Unggul dan Merata;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.

Guna menjamin perencanaan yang berkelanjutan, penting untuk menjaga keselarasan dan konsistensi pada setiap tahap dan tingkatan perencanaan. Hubungan yang harmonis antara misi RPJPD dan misi RPJMD dapat diilustrasikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1
Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Muara Enim dengan Misi RPJMD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029

Misi RPJPD Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumberdaya Manusia yang Sehat, Berkualitas, dan Terlindungi Hak-Hak Sosialnya	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing
Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif



Misi RPJPD Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Baik dan Berkualitas	Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik
Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis Daerah	Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif
Misi 7 : Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
Misi 8 : Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas Melalui Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan	Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Supratruktur Dasar yang Unggul dan Merata

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih operasional dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan menggambarkan arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merinci kondisi terukur yang diharapkan dapat terealisasi selama periode RPJMD. Penyusunan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan visi pembangunan Kabupaten Muara Enim tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran ini selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta pengalokasian sumber daya pembangunan secara efektif dan terarah.

Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025–2029, yang akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja, program, kegiatan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah.



Tabel 3.2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR	
VISI : MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN				
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing				
1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	
	1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	
			Harapan Lama Sekolah	
			Usia Harapan Hidup (UHH)	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
MISI 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh dan inklusif				
1	Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	1.1	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	PDRB Per Kapita	
2	Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat		Indeks Gini	
	2.1	Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2.2	Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin	
MISI 3 : Meningkatkan infrastruktur dan supratraktur dasar yang unggul dan merata				
1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	
	1.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	
MISI 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat ketahanan bencana dan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban umum				
1	Meningkatkan kualitas dan ketahanan lingkungan hidup secara berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	1.1	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca secara berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	
	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah		Indeks Risiko Bencana (IRB)	
	1.2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	
	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	1.3	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran	
MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik				



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan public	
	Indeks Reformasi Birokrasi	
	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP
	1.2	Meningkatnya kapasitas inovasi daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Inovasi Daerah
	1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif Indeks Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan visi “Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”, arah pembangunan daerah tahun 2026 hingga 2030 dirumuskan secara bertahap dan berkesinambungan melalui penetapan tema pembangunan tahunan. Penetapan tema ini mengacu pada prioritas setiap tahap pembangunan, dimulai dari percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pada awal periode, dilanjutkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemantapan pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan serta penguatan daya saing daerah, hingga pemantapan capaian kesejahteraan dan daya saing tersebut.

Puncaknya, pada tahun 2030 ditetapkan tema pembangunan yang merepresentasikan perwujudan visi besar daerah, yaitu “Kabupaten Muara Enim Bangkit dan Sejahtera **“MEMBARA”**”. Perumusan tema pembangunan tahunan ini dimaksudkan untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah memiliki fokus yang jelas, terukur, dan saling menguatkan antar tahun, sehingga menghasilkan dampak pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Berikut ini dijelaskan tema tahapan pertahun yang disandingkan dengan tahapan pembangunan tahun 2026-2030.

Tabel 3.3
Sandingan Tahapan Pembangunan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2026-2030

Tahun	Tahapan Pembangunan	Tema Pembangunan
Tahap I 2026	Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kualitas pelayanan dasar	<i>Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar</i>
Tahap II 2027	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemantapan pelayanan public	<i>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik</i>



Tahun	Tahapan Pembangunan	Tema Pembangunan
Tahap III 2028	Pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah	<i>Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Daya Saing Daerah</i>
Tahap IV 2029	Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah	<i>Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah</i>
Tahap V 2030	Perwujudan Kabupaten Muara Enim Bangkit dan Sejahtera “Membara”	<i>Mewujudkan Kabupaten Muara Enim Bangkit dan Sejahtera “Membara”</i>

3.2.4 Program strategis Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 memuat janji politik Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam 20 program strategis **MEMBARA**, yaitu:

1. Sembako murah;
2. Berobat dan BPJS gratis;
3. Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis (dengan memberdayakan penjahit lokal);
4. Bantuan Kendaraan Operasional Desa/Kelurahan;
5. Program Padat Karya di Setiap Desa Untuk Penciptaan 10.000 Lapangan Kerja Baru;
6. Bantuan Operasional dan Kendaraan Bagi Sekolah, Pondok Pesantren dan Ormas Keagamaan;
7. Pembinaan dan Bantuan Modal Gratis bagi UMKM;
8. Melanjutkan Pembangunan Jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang;
9. Jalan Jembatan Desa Mulus dan Pembangunan Jalan Tembus Baru;
10. Peningkatan Jumlah Program Bedah Rumah Gratis;
11. Bebas Pemadaman Listrik dan Terjaminnya Aliran Air Bersih Lancar;
12. PBB Maksimum Rp. 100.000 dibebaskan/gratis;
13. Bantuan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan Baru/Peremajaan (Replanting);
14. Pembangunan Irigasi/ Pengairan Persawahan;
15. Pupuk Tersedia dan Murah;
16. Bantuan Bibit, Benih dan Alat Mesin Pertanian;
17. Pembangunan Mall dan Kawasan Industri/Pusat Pertanian/Agropolitan Untuk Menciptakan 10.000 lapangan kerja Baru;
18. Bantuan Langsung Tunai Untuk Keluarga Harapan, Anak Yatim/Piatu, Disabilitas dan Lansia;
19. Bupati Ngantor di Desa;
20. Santunan Kematian Rp 3.000.000 mudah dan sederhana.



Program strategis tersebut menjadi prioritas dalam periode 5 Tahun RPJMD Kabupaten Muara Enim yang diterjemahkan melalui strategi, arah kebijakan dan program pembangunan sehingga menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan (RKPD).

3.2.5 Program prioritas pembangunan daerah

Perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dioperasionalkan secara konkret. Dalam penyusunan RPJMD saat ini, terdapat upaya penyelarasan yang kuat antara visi dan misi daerah, tujuan utama, serta arah kebijakan. Hal ini diwujudkan melalui visi dan misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah, yang merupakan agenda strategis kepala daerah selama periode RPJMD, akan menjadi prioritas utama selama lima tahun untuk mencapai target-target daerah. Implementasi program ini dilakukan melalui penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun (2025-2029) dirancang untuk mengatasi isu-isu strategis, yang meliputi:

1. Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan.
2. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM.
3. Degradasi Lingkungan, Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.
4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
5. Ekonomi belum Mandiri dan Berkeadilan.
6. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang belum merata dan berkeadilan.

Program-program ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah strategis daerah. Tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur ditetapkan dengan indikator kinerja yang spesifik. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas RPJMD dan Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik.

3.3 Visi Muara Enim *Smart Regency*

Dengan mengkaji secara mendalam atas visi, misi, program strategis Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029, yang juga harus diselaraskan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia. Walaupun RPJMD Muara



Enim telah terbit terlebih dahulu, maka didapatkanlah keselarasannya dengan Visi Pembangunan Muara Enim. Keselarasan yang sudah ada ini akan dipertahankan dan diakomodasi dalam masterplan Muara Enim Smart Regency. Inilah maksud pengertian yang menyatakan bahwa *framework smart city* menggunakan pendekatan yang holistik dan terpadu, terutama dalam penggunaan teknologi digital dan informasi.

Dari visi dan misi 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD, belum terlihat secara tegas dan eksplisit bagaimana peran dan dukungan teknologi digital dan informasi dalam mendukung ketercapaian, secara efektif dan efisien. Hal ini tentu saja diharapkan dapat mendukung Kepala Daerah dalam merealisasikan semuanya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang

Lebih lanjut perumusan visi Muara Enim Smart Regency juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, identitas, dan aspirasi daerah serta tren persaingan kota atau daerah dalam kancah nasional dan internasional. Dengan demikian maka dirumuskanlah visi Muara Enim Smart Regency sebagai berikut:

“MEMBARA BERSAMA DIGITAL “

Adapun maksud dan tujuan dari tagline tersebut diatas adalah bagaimana kebermanfaatan *smart regency* yang dilanjutkan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2026-2029, dapat mendorong ketercapaian semua hal yang telah direncanakan oleh Kepala Daerah bersama segenap masyarakat Muara Enim, tercapai secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi secara aman, terintegrasi, dan terkoordinasi. Sedangkan warna biru adalah menggambarkan bagaimana warna langit yang saat ini erat kaitannya dengan teknologi *cloud*.

Adapun untuk mencapai visi diatas, perlu dilakukan keselarasan misi pada RPJPD, RPJMD dan elemen-elemen terkait dalam *smart regency*

Tabel 3.4
Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Muara Enim dengan Misi RPJMD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 dan dimensi smart regency

Misi RPJPD Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Dimensi <i>Smart Regency</i>
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumberdaya Manusia yang Sehat, Berkualitas, dan Terlindungi Hak-Hak Sosialnya.	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing.	<i>Smart Society</i>



Misi RPJPD Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Dimensi <i>Smart Regency</i>
Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi.	Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif.	<i>Smart Economy</i>
Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Baik dan Berkualitas.	Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.	<i>Smart Governance</i>
Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum.	<i>Smart Environment-Smart Living</i>
Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing.	<i>Smart Society</i>
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis Daerah.	Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif.	<i>Smart Economy</i>
Misi 7 : Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum..	<i>Smart Living-Smart Environment</i>
Misi 8 : Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas Melalui Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan.	Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Supratruktur Dasar yang Unggul dan Merata.	<i>Smart Branding-Smart Economy</i>

Tahapan selanjutnya dari masterplan ini setelah adanya Visi Muara Enim Smart Regency adalah menyiapkan alat ukur keberhasilan dari visi smart regency tersebut. Alat ukur dari sebuah visi adalah saperangkat sasaran yang didapatkan dari RPJPD dan RPJMD yang diklasifikasikan ke dalam sasaran-sasaran pokok *smart regency*.

Tabel 3.5
Keselarasan sasaran dan indikator pada RPJPD Kabupaten Muara Enim dengan Misi RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 dan dimensi Smart Regency

Dimensi Smart Regency	Indikator	RPJPD	RPJMD
		Sasaran	
<i>Smart Governance</i> (Misi 1 dan Misi 5)	• Pelayanan publik yang transparan (<i>Public Service</i>).	• Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik	• Tersedianya sarana teknologi dan informasi untuk memudahkan arus



Dimensi Smart Regency	Indikator	RPJPD	RPJMD
		Sasaran	
	- Manajemen birokrasi ang efektif (<i>Effective Bureaucracy</i>). - Efisiensi kebijakan publik (<i>Publik Policy</i>).	yang efektif dan efisien. Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik.	informasi dengan lebih luas dan cepat. - Meningkatnya transparansi dan keamanan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. - Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi. - Meningkatnya pelayanan publik oleh para ASN. - Meningkatnya penciptaan dan peningkatan inovasi daerah.
Smart Branding (Misi 8 dan Misi 3)	- Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (<i>Eco-tourism Branding</i>). - Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah sampai tingkat desa secara merata (<i>Business Branding</i>). - Membangun dan memasarkan wajah Kabupaten (<i>Regency Appearance Branding</i>).	Terwujudnya infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas dan memadai secara merata untuk semua wilayah sampai tingkat pedesaan.	- Terciptanya lingkungan usaha yang produktif, efektif, dan efisien, yang dapat menarik minat para investor nasional dan internasional, agar melakukan kegiatan usaha (termasuk iklim investasi). - Tersedianya infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia, dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar.
Smart Economy (Misi 6 dan Misi 2)	- Membangun ekosistem pusat industri strategis local yang berdaya saing (<i>industry eco-system</i>). - Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi (<i>Economic welfare</i>).	- Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian, perkebunan dan pertambangan). secara berkelanjutan - Terwujudnya pengembangan industri pengolahan	- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sampai tingkat pedesaan. - Meningkatnya kemampuan ekonomi kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.. - Tersedianya Infrastruktur untuk mendukung



Dimensi Smart Regency	Indikator	RPJPD	RPJMD
		Sasaran	
	Membangun ekosistem transaksi keuangan secara non tunai (<i>Cashless financial transaction</i>).	yang berbasis pertanian. - Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan teknologi internet. - Meningkatnya literasi digital keuangan untuk semua masyarakat.	produktivitas sektor pertanian dan lumbung pangan. - Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam non tambang bagi masyarakat. - Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi. - Meningkatnya kualitas pengembangan pusat-pusat pengembangan ekonomi strategis daerah.
Smart Living (Misi 7 dan Misi 4)	- Harmonisasi tata ruang wilayah (<i>Harmony</i>) - Mewujudkan sarana dan pasarana kesehatan (<i>Health</i>) - Menjamin ketersediaan sarana transportasi (<i>Mobility</i>)	- Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan RTRW - Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan memadai - Terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan) yang layak - Terwujudnya masyarakat yang mempunyai lingkungan yang layak dan bersih.	- Meningkatnya keamanan dan ketertiban sosial kemasyarakatan - Meningkatnya kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah secara berkeadilan - Meningkatnya ketahanan pangan daerah. - Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. - Terbentuknya masyarakat yang tanggap dan tahan bencana.
Smart Society (Misi 5 dan Misi 1)	- Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (<i>Community quality</i>) - Membangun ekosistem pembelajaran yang efisien (<i>Learning Ecosystem</i>) - Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (<i>Security</i>)	- Mewujudkan masyarakat sehat jasmani dan rohani - Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan baik konvensional/digital - Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik dan demokratis - Terwujudnya masyarakat yang taat menjalankan syariat agama dan saling menghargai	- Menjamin kemudahan dan keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. - Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan baik secara konvensional ataupun digital.



Dimensi Smart Regency	Indikator	RPJPD	RPJMD
		Sasaran	
		• Terwujudnya keamanan dalam masyarakat • Terwujudnya masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri secara bebas dan bertanggung jawab.	
Smart Environment (Misi 4 dan Misi 7)	• Mengembangkan program proteksi lingkungan (<i>Protection</i>) • Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (<i>Waste</i>) • Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung-jawab (<i>Energy</i>)	• Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan • Terwujudnya masyarakat yang mempunyai lingkungan yang bersih	• Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam tanggap/mitigasi bencana • Pemanfaatan sumber ekonomi baru yang bukan berbasis pertambangan

Kementerian Komunikasi dan Digital mengencarkan pengembangan pembangunan *Smart City* untuk mendukung Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang digitalisasi layanan pemerintahan. Visi "Smart City" Presiden Prabowo berfokus pada transformasi digital melalui Asta Cita ke-4 (SDM Unggul) dan kelima (Hilirisasi), dengan implementasi konkret seperti penyediaan Wi-Fi 6 GHz untuk publik demi pemerataan akses ekonomi digital, pengembangan AI untuk layanan publik (kesehatan, birokrasi, keamanan pangan), serta pembangunan infrastruktur digital dan talenta melalui smartboard di sekolah untuk mendukung pendidikan dan inovasi, menuju Indonesia Emas 2045 melalui digitalisasi terintegrasi yang didukung reformasi birokrasi dan perizinan.

Sehingga, terdapat beberapa hal yang harus diselaraskan dan diperbaharui dalam *Masterplan Smart Regency* Kabupaten Muara Enim 2026-2029, yang beririsan secara langsung/tidak langsung dengan kebijakan strategis Kepala Daerah Muara Enim dalam 20 program strategis **MEMBARA**, yaitu:

1. Sembako murah.

Hal ini dapat diselaraskan dengan program peningkatan kualitas pendidikan, gizi, dan ketahanan pangan serta penguatan koperasi yang ada di desa.



2. Berobat dan BPJS gratis.

Hal ini dapat diselenggarakan dengan program peningkatan kualitas kesehatan dengan program smart regency yang berbasis digital.

3. Seragam dan perlengkapan sekolah gratis.

Hal ini dapat diselenggarakan dengan program kemandirian desa (dengan memberdayakan penjahit lokal) dan penguatan koperasi.

4. Bantuan kendaraan operasional desa/kelurahan,

Hal ini dapat diselenggarakan dengan program-program bantuan pembangunan dari pusat serta meningkatkan peran serta CSR dari BUMN ataupun perusahaan swasta yang beroperasi di lingkungan Kabupaten.

5. Program padat karya di setiap desa untuk penciptaan 10.000 lapangan kerja baru.

Hal ini dapat diselenggarakan dengan program kemandirian desa, peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, serta pengolahan lingkungan hijau yang berkelanjutan dengan membuka berbagai macam lapangan kerja non-tambang.

6. Bantuan operasional dan kendaraan bagi sekolah, pondok pesantren dan ormas keagamaan.

Hal ini dapat diselenggarakan dengan program-program bantuan pembangunan dari pusat serta meningkatkan peran serta CSR dari BUMN ataupun perusahaan swasta yang beroperasi di lingkungan Kabupaten.

7. Pembinaan dan bantuan modal gratis bagi UMKM.

Hal ini dapat diselenggarakan dengan pengembangan koperasi, program-program bantuan pembangunan dari pusat serta meningkatkan peran serta CSR dari BUMN ataupun perusahaan swasta yang beroperasi di lingkungan Kabupaten. Dan peningkatan kapabilitas digital yang merata di seluruh wilayah.

8. Melanjutkan pembangunan jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang.

Hal ini dapat diselenggarakan dengan program-program pembangunan strategis dari pusat.

9. Jalan jembatan desa mulus dan pembangunan jalan tembus baru.

Hal ini dapat diselenggarakan dengan program kemandirian dan kebersihan wilayah sebagai modal pariwisata dan devisa, dimulai dari desa hingga kota, sebagai bagian dari upaya menumbuhkan devisa melalui pariwisata dan perekonomian lokal.

10. Peningkatan jumlah program bedah rumah gratis.

Hal ini dapat diselenggarakan dengan program-program bantuan pembangunan dari pusat serta meningkatkan peran serta CSR dari BUMN ataupun perusahaan swasta yang



beroperasi di lingkungan Kabupaten. Dan juga melalui hasil pengolahan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular.

11. Bebas pemadaman listrik dan terjaminnya aliran air bersih lancer.

Hal ini dapat diselaraskan dengan pengembangan dan pembangunan sumber-sumber listrik yang berbasis energi baru terbarukan dan ekonomi hijau, dan dapat juga dari pengolahan sampah terpadu yang dikembangkan pada tingkat desa.

12. PBB Maksimum Rp. 100.000 dibebaskan/gratis.

Hal ini dapat diselaraskan dengan kemandirian desa, ekonomi hijau, dan pengurangan/pengolahan sampah secara terpadu berbasis ekonomi sirkular.

13. Bantuan alat berat untuk pembukaan lahan baru/peremajaan (*Replanting*).

Hal ini dapat diselaraskan dengan kemandirian desa, ekonomi hijau, dan pengurangan/pengolahan sampah secara terpadu berbasis ekonomi sirkular.

14. Pembangunan irigasi/ pengairan persawahan.

Hal ini dapat diselaraskan dengan kemandirian desa, ekonomi hijau, dan pengurangan/pengolahan sampah secara terpadu berbasis ekonomi sirkular serta bantuan dari pusat/BUMN/perusahaan swasta.

15. Pupuk tersedia dan murah.

Hal ini dapat diselaraskan dengan memoerkuat daptasi krisis iklim dan daya dukung lingkungan serta peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian desa

16. Bantuan bibit, benih dan alat mesin pertanian.

Hal ini dapat diselaraskan dengan memoerkuat adaptasi krisis iklim dan daya dukung lingkungan serta peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian desa

17. Pembangunan mall dan kawasan industri/pusat pertanian/agropolitan untuk menciptakan 10.000 lapangan kerja baru.

Hal ini dapat diselaraskan dengan penguatan koperasi dan kemandirian desa, ekonomi hijau, dan pengurangan/pengolahan sampah secara terpadu berbasis ekonomi sirkular serta kemitraan strategis bersama BUMN/perusahaan swasta

18. Bantuan langsung tunai untuk keluarga harapan, anak yatim/piatu, disabilitas dan lansia.

Hal ini dapat diselaraskan dengan pembangunan *smart regency*. Hal ini agar bantuan tunai tersebut berbentuk digital/*cash-less*, dan pembelanjaan melalui koperasi dan kemandirian desa

19. Bupati Ngantor di Desa.



Hal ini dapat diselaraskan dengan pembangunan *smart regency*. Hal ini agar Bupati dapat berkantor secara efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi digital dan informasi.

20. Santunan kematian Rp 3.000.000 mudah dan sederhana.

Hal ini dapat diselaraskan dengan pembangunan *smart regency*. Hal ini agar bantuan tunai tersebut berbentuk digital/*cash-less*, dan pembelanjaan melalui koperasi dan kemandirian desa.

3.4 Strategi pembangunan *Smart Regency*

Dalam rangka mewujudkan visi “Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan” sehingga menghasilkan visi Muara Enim *Smart City* **MEMBARA BERSAMA DIGITAL** yang dimulai pada tahun 2026 dan puncaknya, pada akhir tahun 2029 yang dipetakan terlebih dahulu berdasarkan produk dan program beserta waktu pemenuhannya pada setiap dimensi *smart regency*.

Tabel 3.6
Produk dalam strategi pembangunan *Smart Governance*

Elemen Dimensi	Produk Program Dimensi
• Pelayanan publik yang transparan (<i>Public Service</i>) • Manajemen birokrasi yang efektif (<i>Effective Bureaucracy</i>) • Efisiensi kebijakan publik (<i>Publik Policy</i>).	Integrasi sistem informasi manajemen keuangan, perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, serta monitoring dan evaluasi proyek dan kegiatan
	Penguatan sistem pengadaan dan pemantauan pelaksanaan proyek pemerintah yang transparan dan <i>realtime</i>
	Pemantapan koordinasi bersama dewan TIK daerah
	Pembaharuan sistem informasi perizinan terpadu
	Sistem informasi pelayanan pajak (<i>CoreTax</i>)
	Optimalisasi layanan pelaporan gangguan sistem informasi
	Optimalisasi sistem manajemen keuangan desa
	Sistem informasi transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Mengembangkan sistem informasi pengelolaan kearsipan
	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi atas penyerapan anggaran daerah
	Pengembangan mall pusat layanan informasi publik
	Pengembangan sistem informasi musrenbangda dan musrenbangdes
	Pemutakhiran dan keamanan sistem informasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil
	Pembangunan <i>City Operation Center</i>
	Optimisasi website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
	Penataan peraturan perundang-undangan
	Optimisasi administrasi tata naskah dinas
	Pembinaan kelompok informasi (KIM)



Elemen Dimensi	Produk Program Dimensi
	Peningkatan jaringan dan kecepatan bandwidth jaringan internet pemerintah
	Pembangunan jaringan serat optic sampai ke pelosok daerah
	Penguatan sistem pelaporan masyarakat melalui SP4N/LAPOR
	Pengembangan sistem informasi manajemen pendapatan daerah dan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP)

Tabel 3.7
Produk dalam strategi pembangunan Smart Branding

Elemen Dimensi	Produk Program Dimensi
Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (<i>Eco-tourism Branding</i>)	Mengembangkan <i>investment lounge center</i>
	Mengembangkan fitur-fitur <i>investment lounge digital</i>
	Menggelar festival budaya dan atau temu investor secara berkala tingkat nasional dan internasional
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas akses ke berbagai objek wisata, budaya, dan sentra usaha baru
Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah sampai tingkat desa secara merata (<i>Business Branding</i>)	Meningkatkan interaksi masyarakat melalui social media
	Program promosi kawasan industri/pariwisata hijau
	Pengkajian program insentif investasi
	Pembangunan kampung wisata tematik
Membangun dan memasarkan wajah Kabupaten (<i>Regency Appearance Branding</i>)	Penguatan promosi produk – produk unggulan Muara Enim selain kopi (perikanan-pertanian-agrowisata)
	Memperbaiki kuantitas dan kualitas direktori dan review objek wisata, hotel, tempat belanja di aplikasi dan website
	Membuat slogan dan logo khusus pariwisata
	Pemanfaatan SEO dan <i>social media marketing</i> untuk produk dan layanan dengan kompetisi tinggi
	Sistem informasi panduan dan direktori pariwisata
	<i>Landmark Muara Enim Smart Regency</i>
	Penguatan dan pengembangan kawasan wisata kuliner
	Pengembangan sumber daya dan pemasaran ekonomi kreatif

Tabel 3.8
Produk dalam strategi pembangunan Smart Economy

Elemen Dimensi	Produk Program Dimensi
Membangun ekosistem pusat industri strategis local yang berdaya saing (<i>industry eco-system</i>)	Percepatan pengembangan kawasan agropolitan/ agrowisata berbasis pertanian-perkebunan-perikanan
	Percepatan pengembangan kawasan minapolitan
	Percepatan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Gelumbang
	Pelaksanaan kartu Muara Enim <i>Smart Regency (e-money)</i> untuk bantuan langsung tunai/pendidikan/kematian
Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi (<i>Economic welfare</i>)	Pengembangan sistem ketahanan pangan dan energi
	Penguatan sistem pembayaran non tunai
	Revitalisasi pasar-pasar tradisional terutama daerah pedesaan
	Membangun ekosistem <i>E-commerce</i> sampai tingkat internasional untuk program usaha unggulan
	Pendampingan pemasaran via <i>marketplace digital</i> bersama kampus/universitas



Elemen Dimensi	Produk Program Dimensi
Membangun ekosistem transaksi keuangan secara non tunai (<i>Cashless financial transaction</i>).	Penambahan dan penguatan pusat inkubasi bisnis bagi pelaku industri kreatif dan UMKM
	Sistem informasi perizinan produk industri rumah tangga
	Penyusunan peta jalan / rencana aksi pengembangan klaster industri barang jadi
	Menjaga kualitas dan kuantitas Makan Bergizi Gratis
	Pengembangan dan pemberdayaan koperasi

Tabel 3.9
Produk dalam strategi pembangunan Smart Living

Elemen Dimensi	Produk Program Dimensi
- Harmonisasi tata ruang wilayah (<i>Harmony</i>) - Mewujudkan sarana dan pasarana kesehatan (<i>Health</i>) - Menjamin ketersediaan sarana transportasi (<i>Mobility</i>)	Pengembangan dan perluasan pembangunan taman-taman tematik, terutama ramah anak
	Penyediaan fasilitas internet dan wifi di ruang publik
	Pengembangan sistem transportasi massal Trans Muara Enim
	Sistem integrasi layanan puskesmas dan rumah sakit (atrian, rujukan, ketersediaan kamar)
	Peningkatan program sanitasi dan air bersih
	Peningkatan sistem transportasi berbasis kereta api, terutama untuk logistik/batubara
	Pemantauan sistem dan manajemen lalu lintas terutama untuk kendaraan berat
	Pengembangan sistem informasi konsultasi kesehatan berbasis digital
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas BPJS
	Pengembangan pemantauan kesehatan secara <i>mobile</i> atau menggunakan motor untuk daerah yang masih sulit akses kendaraan mobil
	Pelaksanaan program kartu Muara Enim <i>Smart Regency (health)</i>
	Pengembangan sistem <i>Push notification</i> jadwal terapi berbasis WhatsApp/Sosial Media
	SAMARA (Sistem dan Aplikasi Masyarakat Terencana) KB, peningkatan pendidikan pranikah dan usia kawin pertama, layanan pemberdayaan perempuan dan anak
	Instalasi penerangan cerdas (<i>smart lighting</i>) untuk di jalan dan kantor-kantor pemerintah
	Angkutan bus sekolah antar desa dalam kecamatan di seluruh kabupaten Muara Enim

Tabel 3.10
Produk dalam strategi pembangunan Smart Society

Elemen Dimensi	Produk Program Dimensi
Mewujudkan interaksi masyarakat yang	Peningkatan laboratorium ilmu alam (<i>living lab science</i>) dan kemampuan IT di sekolah-sekolah
	Pendidikan politik dan demokrasi masyarakat
	Pengembangan sistem informasi gender dan anak



efisien (<i>Community quality</i>) • Membangun ekosistem pembelajaran yang efisien (<i>Learning Ecosystem</i>) • Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (<i>Security</i>)	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling bagi remaja
	Pelaksanaan Kartu Muara Enim <i>Smart Regency (education)</i>
	Pembangunan MOOC (Muara Enim <i>Open Course</i>) fisik
	Pengembangan perpustakaan digital yang diintegrasikan dengan perpustakaan nasional Indonesia
	<i>Multicultural Camp</i> untuk pemuka agama dan pelopor keharmonisan antar lapisan masyarakat
	Pembentukan dan pembinaan komunitas lokal
	Sosialisasi dan simulasi tanggap bencana untuk masyarakat
	Program pengamanan sistem informasi hoaks
	Beasiswa jalur prestasi dan ekonomi khusus
	Peningkatan pendidikan warga berkebutuhan khusus
	Sistem informasi pendaftaran dan prestasi siswa
	Sistem informasi keadaan gawat darurat
	Program peningkatan literasi digital
	Implementasi konsep <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>
	Pemasangan kamera pengawas (IP CCTV) di instalasi penting dan daerah rawan kejahatan

Tabel 3.11
Produk dalam strategi pembangunan Smart Environment

Elemen Dimensi	Produk Program Dimensi
• Mengembangkan program proteksi lingkungan (<i>Protection</i>) • Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (<i>Waste</i>) • Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung-jawab (<i>Energy</i>)	Peningkatan kualitas laboratorium, alat dan SDM di dinas lingkungan hidup
	Pemasangan sensor pengukuran polusi air dan udara
	Peningkatan kualitas dan kuantitas BPBD
	Peningkatan kuantitas dan kualitas alat komunikasi berbasis satelit di setiap kecamatan
	Pengembangan sistem informasi curah hujan dan debit sungai
	Pengembangan database informasi geospasial
	Perbaikan tata kelola limbah dan sanitasi rumah tangga
	Pemetaan tata ruang dan wilayah berbasis 3D
	Sistem informasi pelaporan dokumen AMDAL
	Portal informasi kualitas lingkungan bersama komunitas
	Pemantauan manajemen tambang masyarakat dan ilegal
	Peningkatan sistem pengelolaan sampah terpadu dan ekonomi sirkular pedesaan
	Pemantauan sistem dan monitoring penghijauan kembali area tambang dan pasca tambang
	Program penggunaan energi terbarukan dan ketahanan energi

3.5 Analisa SWOT/TOWS

Analisa SWOT dan TOWS bukan sekadar alat analisis internal dan eksternal dalam suatu pemerintah daerah, tetapi fondasi untuk strategis pengembangan/pembangunan yang



adaptif dan berbasis data, sehingga pemerintah daerah mampu menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai target pembangunan secara efektif.

Dengan analisa SWOT, dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) internal, serta peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) eksternal. Dengan pemetaan ini, pemerintah memiliki gambaran menyeluruh tentang posisi daerah dalam konteks pembangunan, termasuk faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan regulasi.

Akan tetapi, analisa SWOT juga dilengkapi dengan analisa TOWS yang melangkah lebih jauh dengan merumuskan strategi konkret dengan kombinasinya:

- **SO:** Memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang
- **ST:** Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
- **WO:** Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
- **WT:** Mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman

3.5.1 *Smart Governance*

Dengan visi MEMBARA serta perangkat kebijakan dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026, Kabupaten Muara Enim memiliki pijakan kuat untuk meningkatkan tata kelola yang transparan, akuntabel, digital, dan berorientasi hasil yang efektif dan efisien melalui kolaborasi antar OPD, masyarakat, perangkat hukum, dan perangkat sosial lainnya.

Strengths (Kekuatan)

- Terdapat arah kebijakan yang jelas dan sinkron yaotu: RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 menyelaraskan visi MEMBARA dengan RPJMN/RPJPD; skala prioritas yang menyentuh tata kelola secara profesional dan berorientasi kepada pelayanan publik.
- Transparansi anggaran dan akuntabilitas meningkat, adanya portal transparansi 2025, melakukan publikasi laporan keuangan, mendorong KUA PPAS/APBD-P secara terbuka; melakukan dorongan untuk menekan SiLPA dan memperkuat disiplin fiskal.
- Menunjukkan hasil atas pelayanan publik berkinerja tinggi: mendapatkan predikat A Zona Hijau dari pihak Ombudsman (peningkatan nilai), melakukan pendampingan anti maladministrasi; adanya komitmen PPID dan SLIP 2025 terdepan di Sumsel.
- Kestabilan dan kemajuan dalam penyusunan arsitektur/peta rencana serta implementasi SPBE (index angka 3=baik, tahun 2024) dan evaluasi serta pembaharuan Smart City sebagai modal digital untuk efisiensi & integrasi layanan 2026 dan berikutnya.



- Telah membangun ekosistem data yang kuat: publikasi BPS 2024 (Dalam Angka, Statistik Daerah) dan IPS/EPSS tertinggi; dukungannya terhadap Satu Data memperkuat evidence based policy.

Weaknesses (Kelemahan)

- Tingkat integritas yang lemah karena adanya rangkaian kasus korupsi proyek PUPR 2019–2022 (oleh pihak eksekutif & legislatif). Hal ini mengikis kepercayaan dan menuntut peningkatan pengendalian pengadaan/kontrak yang baik dan benar secara hukum.
- Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan, karena kontribusi pertambangan sangat dominan. Hal ini dapat menimbulkan risiko fiskal ekologis saat siklus komoditas bergejolak; diversifikasi produk dan manfaat masih belum optimal.
- Masih lemahnya kuantitas dan kualitas para ASN pemerintah daerah.
- Isu atas layanan lintas sektor infrastruktur (masih tingginya jalanan yang rusak, angkutan batubara yang belum optimal dan masih tingginya tingkat pencemaran sungai). Hal ini menunjukkan koordinasi kebijakan multi aktor perlu diperkuat (antara pihak pemda–provinsi–korporasi).
- Tingkat kematangan Smart City belum merata berdasarkan evaluasi Komdigi tahap II . Memang implementasi belum sempurna dan masih ada celah integrasi lintas OPD & kelengkapan eviden. Serta masih banyaknya daerah yang memiliki lemah sinyal.
- Kapasitas keuangan fiskal daerah yang masih terbatas, karena PAD 2025 masih < Rp 0,5 triliun (namun memiliki target naik sekitar 1 triliun dalam 5 tahun mendatang), selanjutnya adalah dengan penguatan basis pajak/retribusi dan manajemen aset perlu akselerasi.

Opportunities (Peluang)

- Memiliki target PAD sekitar Rp 1 triliun melalui optimalisasi dan koordinasi Satgas PAD, optimalisasi aset, dan pengawasan serapan tenaga kerja lokal sekitar 70%. Hal ini diharapkan mendorong kemandirian peningkatan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan integrasi SPBE & Satu Data melalui arsitektur SPBE dan optimalisasi portal layanan (SP4N LAPOR, SIRUP, OSS, PPID, SISTER) dalam mendukung transparansi, responsivitas, dan *data driven governance*.



- Kredit reputasi layanan publik melalui SAKIP/LAKIP serta predikat dari Ombudsman & SLIP yang memudahkan kolaborasi lintas lembaga/CSR untuk pembiayaan alternatif non APBD.
- Agenda nasional (dalam Asta Cita & RPJMN) yang sinkron dengan visi MEMBARA: memperluas dukungan transfer pusat dan program sektoral tahun 2026.
- Fondasi secara statistik oleh pihak BPS memadai untuk pengukuran dampak (kemiskinan, stunting, inflasi, IKM) dan performance budgeting—meningkatkan akuntabilitas program 2026.

Threats (Ancaman)

- Adanya risiko terjadinya korupsi dan konflik kepentingan dalam pengadaan/kontrak publik pasca kasus PUPR. Hal ini butuh komitmen *open contracting* dan *audit* berkelanjutan.
- Volatilitas komoditas & dampak lingkungan sektor tambang (harga batubara, protes sosial, kerusakan infrastruktur) berpotensi mengganggu layanan dan fiskal daerah.
- Adanya tekanan inflasi dan menurunnya daya beli (contoh rilis BPS Sumsel 2024) dapat mempengaruhi biaya program dan kepuasan layanan jika tidak direspon adaptif.
- Tingkat keamanan dan keharasaan data seiring percepatan implementasi SPBE/Smart City (aplikasi digital publik). Hal ini memerlukan penguatan cybersecurity dan tata kelola data lintas OPD.
- Kapasitas implementasi OPD yang heterogen (hasil evaluasi *Smart City 2024*) bisa menghambat integrasi dan konsistensi layanan 2026.

Berdasarkan hasil analisa SWOT pada elemen *Smart Governance* diatas, maka dilakukan Matriks TOWS/Strategi turunan yang dapat ditindaklanjuti

Strategi S–O (Menggunakan Kekuatan untuk Menangkap Peluang)

- Memperkuat Program *Open Budget & Open Contracting 2.0*.
Gunakan reputasi keterbukaan yang sudah baik (Ombudsman/PPID) dan portal anggaran untuk menerapkan *e-procurement* berbasis SIRUP/LPSE dan *contract disclosure* (metadata, jadwal, perubahan) yang terintegrasi ke dalam arsitektur SPBE, untuk memperkuat Satgas PAD dan menarik kolaborasi CSR/transfer pusat.
- Meningkatkan dashboard kinerja RKPD 2026 berbasis Satu Data.



Melakukan Orkestrasi data BPS/OPD (kemiskinan, stunting, inflasi, IKM) di SISTER untuk memantau performance budgeting, memunculkan early warning inflasi, dan pelaporan publik triwulanan serta memperkuat evidence based governance yang disyaratkan dalam RPJMD/RKPD.

- Membuka *multi-channel* dalam peningkatan layanan publik.
Manfaatkan indeks SPBE dan kanal resmi yang telah ada (SP4N LAPOR, Dulur Kito, PPID) untuk layanan berbasis peristiwa hidup (kelahiran–kematian, izin usaha, bantuan sosial) dengan SLA jelas; konsolidasi inovasi OPD agar nilai kepatuhan Ombudsman tetap di Zona Hijau.

Strategi S–T (Menggunakan Kekuatan untuk Menahan Ancaman)

- Memperkuat regimen anti korupsi berbasis digital.
Dengan nilai SPBE yang sudah baik berbasiskan data dan transparansi, wajibkan pemetaan risiko pengadaan (*risk register*) dan audit data kontrak secara berkala (dapat melibatkan pihak luar yang independen dan terpercaya, melakukan blacklist pemasok/vendor yang bermasalah, serta memantau secara real time vendor performance untuk mencegah pengulangan kasus.
- Manajemen dampak tambang lintas OPD.
Membentuk gugus tugas layanan publik (koordinasi antara PUPR, Lingkungan, Perhubungan, Satpol PP) yang terhubung ke dashboard keluhan SP4N LAPOR untuk penanganan cepat isu jalan/angkutan/pencemaran; sinkronisasi kebijakan dalam jam operasional angkutan (09.00–05.00) dengan pengawasan lapangan secara tegas dengan CCTV/drone.
- Meningkatkan keamanan informasi & privasi data
Terapkan security baseline SPBE (manajemen akses, audit log, enkripsi, backup lintas site) untuk aplikasi layanan (PPID, Dulur Kito, Disdukcapil) dan lakukan *red team exercise* tahunan.

Strategi W–O (Menutup Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)

- Diversifikasi dalam meningkatkan PAD & penguatan aset yang dimiliki



Satgas PAD harus dapat memetakan sumber PAD yang baru (dari pariwisata, parkir, pemanfaatan aset yang belum termanfaatkan (*idle asset*), peningkatan PBB P2, pajak penerangan jalan, retribusi perizinan OSS) dan menyusun asset registry dan leasing transparan; serta meningkatkan jumlah CSR untuk *quick wins* infrastruktur layanan.

- Pemantapan Smart City tahap implementasi lanjutan

Menindaklanjuti hasil evaluasi 2024 dan pembaharuan masterplan 2026-2029: tetapkan service catalogue lintas OPD, standarisasi atas data-data yang digunakan, dan mengintegrasikan KPI; serta fokus pada layanan prioritas RKPD 2026 (izin usaha, kesehatan, administrasi kependudukan) agar manfaat dapat terasa langsung kepada masyarakat.

- Koordinasi lintas pihak untuk level pemerintahan (daerah dengan pusat)

Gunakan momentum sinkronisasi Asta Cita/RPJMN untuk skema peningkatan *co-financing* (DAK tematik, BLU, KPBU kecil) pada perbaikan jalan dan drainase, usaha pengendalian banjir, dan melakukan mitigasi dampak tambang agar dapat mengurangi beban APBD.

Strategi W–T (Mengurangi Kelemahan & Menghindari Ancaman)

- Mewajibkan kebijakan *Integrity Pact & Conflict of Interest Disclosure*.

Wajibkan pakta integritas pimpinan OPD/pemimpin proyek strategis, melakukan rotasi panitia pengadaan, cooling off pemasok pasca sanksi; libatkan Inspektorat/penegak hukum yang relevan secara proaktif untuk audit kepatuhan pasca kontrak guna mencegah kebocoran anggaran/permainan pihak-pihak tertentu.

- Rencana kontinjensi fiskal berbasis skenario komoditas.

Susun medium *term fiscal framework* dengan skenario harga batubara yang dinamis, dimana alokasikan cadangan belanja dan prioritas program esensial layanan apabila pendapatan turun; publikasikan secara terbuka di portal pemerintah daerah secara transparan.

- Penguatan kapasitas OPD dan para ASN pemerintah daerah.

Pasca evaluasi Smart City dapat melakukan capacity building teknis (teknik pengadaan, pengolahan data, layanan digital), *peer review* antar OPD, dan IKM rutin; contoh praktik baik yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil & Pengadilan Negeri, yang sudah menjalankan survei kepuasan berkala.



Adapun kunci keberhasilan dalam analisa SWOT/TOWS pada implementasi *smart governance* adalah: (i) konsistensi *open governance* (anggaran/kontrak/data), (ii) percepatan integrasi SPBE/Smart City lintas OPD, (iii) penguatan Satgas PAD & diversifikasi, dan (iv) mitigasi *legacy risk integritas* serta mitigasi dampak sektor tambang yang seluruhnya berbasis data BPS dan pengawasan pihak terkait.

3.5.2 *Smart Branding*

Smart Branding di pemerintahan daerah adalah pengelolaan identitas, citra, dan reputasi daerah yang terintegrasi dengan layanan digital, data, dan partisipasi warga/komunitas.

Strengths (Kekuatan)

- Narasi citra kabupaten payung kuat dan konsisten (“MEMBARA”) dalam Visi Kepala Daerah dan RPJMD, yang mudah ditransformasikan menjadi brand architecture lintas sektor dan kampanye tematik tahunan.
- Wajah digital terpusat, berkat adanya website resmi & aplikasi Dulur Kito) yang dapat menjadi single source of truth untuk kampanye, service journey, dan kanal partisipasi.
- Memiliki produk lokal yaitu kopi, yang sudah terkenal baik atas cita rasa dan packaging yang modern, serta buah durian yang walaupun sebagian besar bukan berasal dari Muara Enim.
- Memiliki sumber daya alam tambang batubara yang kualitasnya adalah salah satu terbaik di dunia. Selain itu juga ada tambang minyak dan gas alam.
- Memiliki potensi sumber daya alam air terjun dan agrowisata di desa/pedalaman (natural).

Weaknesses (Kelemahan)

- Fragmentasi identitas visual & pesan lintas OPD (hasil evaluasi Smart City menyinggung belum sempurna), dapat terjadi risiko *brand inconsistency* antar unit layanan.
- Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan, membuat brand daerah mudah distereotipkan sebagai “kabupaten tambang”, menyulitkan positioning “berkelanjutan & inovatif” bila tak diimbangi konten diversifikasi.



- Legacy risk integritas (ekspos kasus korupsi pengadaan)—butuh komunikasi reformasi & open contracting agar persepsi publik positif terhadap inovasi branding.
- Kapasitas konten & desain internal belum seragam (skill copywriting, UX, video, data vizual), dapat mempengaruhi kualitas kampanye lintas kanal.
- Masih kurangnya akses yang lancar dan mudah bagi turis luar daerah untuk mengunjungi daerah-daerah wisata.
- Belum terdiversifikasinya produk kuliner daerah.

Opportunities (Peluang)

- Penguatan *experience based branding* lewat integrasi SPBE/Smart City (service catalogue, SP4N LAPOR, PPID, OSS) sehingga citra kabupaten dirasakan baik positif melalui kelancaran layanan digital sehari-hari.
- Kolaborasi CSR & komunitas (Satgas PAD dorong serapan tenaga kerja lokal; reputasi layanan/PPID tinggi) untuk melakukan kampanye *co-branding* di sektor pariwisata, melibatkan UMKM, meningkatkan literasi digital.
- Sinkronisasi narasi daerah dengan agenda nasional (Asta Cita/RPJMN) untuk penguatan positioning “Maju & Berkelanjutan”, termasuk dukungan program tematik lintas kementerian, terutama pasca tambang.
- Meningkatkan pasar produk lokal menuju nasional dan internasional, bermitra dengan perindustrian/perdagangan.
- Pemanfaatan kanal digital yang makin matang (website, aplikasi, media sosial resmi) sebagai *always on communication and interactive* dengan warga dan investor.

Threats (Ancaman)

- Isu kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan (jalan yang rusak/sistem angkutan yang tidak terintegrasi/pencemaran air dan sungai) dapat menjadi brand risk jika keluhan publik tidak tertangani cepat. Sehingga narasi bisa berbalik negatif.
- Tidak terjaganya keamanan dan privasi data pada akselerasi layanan digital (aplikasi, PPID), sehingga insiden serangan siber akan merusak reputasi branding berbasis digital.
- Volatilitas komoditas dan opini publik terhadap kebijakan tambang, timbulnya persepsi “pertumbuhan tidak inklusif” bila tidak diimbangi program ekonomi lokal dan perlindungan sosial masyarakat.



- Adanya informasi yang tidak akurat/hoaks di media sosial dapat menggerus kepercayaan bila tidak ada *rapid response dan fact checking* yang terkoordinasi.
- Keterbatasan SDM yang kreatif dan content fatigue, dapat berisiko kehilangan daya tarik bila tidak didukung kalender konten & riset audiens.

Berdasarkan hasil analisa SWOT pada elemen *Smart Branding* diatas, maka dilakukan Matriks TOWS/Strategi turunan yang dapat ditindaklanjuti

Strategi S–O (Memaksimalkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang)

- *Brand as a Service (BaaS)*
BaaS adalah model di mana merek (identitas, citra, strategi pemasaran) ditawarkan sebagai layanan terkelola, memastikan konsistensi di semua channel, membangun kepercayaan pelanggan melalui pengalaman seragam, dan memperdalam hubungan emosional
- **Kekuatan MEMBARA**
Integrasikan narasi MEMBARA ke “journey layanan prioritas” (adminduk, perizinan, kesehatan) di portal & aplikasi; ukur brand experience metrics (SLA, kepuasan SP4N, IKM) dan ceritakan capaian di PPID/website sebagai “branding berbasis bukti”.
- *Data Driven Storytelling Hub*
Bangun content hub “Serasan Sekundang Data” di website: infografik BPS, kisah dampak program (kemiskinan, stunting, inflasi), micro stories warga/UMKM; manfaatkan IPS/EPSS sebagai bukti ekosistem data kuat.
- Melakukan *Co-branding* antara CSR dan peran komunitas lokal
- Membangun kampanye bersama BUMN/BUMD/Swasta (misalnya dengan pendidikan vokasi, ketahanan pangan, lingkungan) yang bersumber pada MEMBARA dan RKPD 2026—publikasikan di PPID/SLIP untuk menambah kredibilitas.
- Membangun jejaring internasional melalui peran serta perindustrian/perdagangan.

Strategi S–T (Memakai Kekuatan untuk Menahan Ancaman)

- *Crisis Ready Branding*



Menggunakan dan memaksimalkan reputasi pelayanan & kanal resmi yang ada (PPID, SP4N LAPOR) untuk *fast response* dalam isu pertambangan (jalan/angkutan/pencemaran); menciptakan status board harian dengan waktu tanggap ≤ 5 hari dan posting di media sosial.

- Tingkat keamanan by *Design* pada kanal *branding*
Terapkan baseline keamanan SPBE (manajemen akses, audit log, enkripsi) pada website & aplikasi; publikasikan transparency report triwulanan (uptime, insiden, tindak lanjut) untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor.
- *Open Contracting for Reputation*
Publikasikan metadata kontrak kampanye/komunikasi publik dan proyek strategis (nilai, kualifikasi vendor, status perubahan secara *realtime*) di portal transparansi untuk menutup celah persepsi negatif pasca kasus.

Strategi W–O (Menutup Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)

- Terapkan MEMBARA sebagai alat pantau
Tetapkan “Brand MEMBARA” untuk melakukan review secara periodik berbasis KPI layanan kepada masyarakat.
- Diversifikasi produk dan ekonomi lokal
Kampanyekan tematik “Beyond Mining” dengan peran UMKM dan Koperasi Merah Putih, kampanye pariwisata alam dan budaya “Bumi Serasan Sekundang”, melakukan inovasi pertanian/ketahanan pangan dan selaraskan dengan Satgas PAD & CSR untuk menyeimbangkan posisi pendapatan selain APBN/APBD.
- *Capacity building* atas konten dan kreatifitas
Pelatihan *copywriting* tentang kebijakan, peningkatan pelatihan untuk data visualization dan video pendek layanan, dan service design untuk admin OPD agar kualitas konten seragam dan berorientasi pengalaman warga.

Strategi W–T (Mengurangi Kelemahan & Menghindari Ancaman)

- *Integrity Communication Plan*



Melakukan kampanye atas “Reformasi Pengadaan” (pakta integritas, blacklist vendor, audit berkala) agar publik melihat perbaikan nyata atas integritas ASN Pemda; memaksimalkan PPID sebagai kanal utama *accountability storytelling*.

- Menggencarkan *Anti Hoax & Fact Checking Squad*

Membentuk tim lintas OPD untuk *active social listening* dan klarifikasi cepat atas berita-berita hoax/menyesatkan; membiasakan menggunakan data dari BPS & dokumen resmi (RPJMD/RKPD) sebagai rujukan otoritatif dalam setiap bantahan.

- *Brand Risk Register*

Buat daftar risiko reputasi (lingkungan, layanan, keamanan data) dengan pemilik asli oleh OPD, indikator early warning, dan SOP komunikasi krisis teruji melalui simulasi per semester.

Smart branding Muara Enim akan efektif bila MEMBARA bukan sekadar slogan, melainkan pengalaman layanan yang nyata, terbuka, dan aman oleh semua masyarakatnya. Dengan narasi MEMBARA sebagai payung, fondasi kolaborasi yang kuat atas SPBE/*Smart Regency*, dan content hub berbasis data BPS. Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat menempatkan diri sebagai daerah yang melayani dengan baik, tumbuh secara inklusif, dan berkomitmen pada keberlanjutan dan sekaligus menjaga reputasi melalui transparansi pengadaan dan respons cepat atas isu lintas sektor.



3.5.3 *Smart Society*

Smart society dimaknai sebagai masyarakat yang berdaya saing, inklusi digital, partisipatif, dan berketahanan, yang didukung oleh layanan publik digital terpadu, data terbuka, dan kolaborasi multi pihak (pemerintah, komunitas, dunia usaha/CSR, academia).

Strengths (Kekuatan)

- **Komitmen pemerintah daerah**
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menunjukkan komitmen tinggi terhadap inovasi melalui RPJMD dan program *Smart Regency Roadmap* yang terintegrasi dengan visi pembangunan daerah
- **Infrastruktur pembelajaran digital yang berkembang**
Akses internet yang semakin luas sampai ke pelosok pedesaan menjadi pondasi utama untuk transformasi digital, mendukung layanan publik berbasis online, pendidikan jarak jauh, dan ekonomi digital.
- **Sumber daya manusia yang adaptif belajar**
Generasi muda yang kreatif dan melek digital menjadi motor penggerak inovasi, terutama dalam sektor UMKM berbasis online dan ekonomi kreatif.
- **Kolaborasi dan inovasi sosial**
Budaya gotong royong yang berpadu dengan inovasi. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis teknologi yang menjawab kebutuhan lokal, seperti aplikasi layanan desa, sistem informasi kesehatan, dan platform edukasi.
- **Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan keseharian**
Mulai mengintegrasikan teknologi seperti CCTV di area publik dan sistem informasi keamanan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap potensi gangguan.
- **Stabilitas sosial dan politik**
Memiliki kondisi sosial yang relatif kondusif, dengan tingkat konflik yang rendah, sehingga mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah



Weaknesses (Kelemahan)

- Partisipasi masyarakat belum merata
Tidak semua kelompok masyarakat aktif terlibat dalam program pembangunan. Komunitas di daerah terpencil cenderung kurang berpartisipasi karena keterbatasan infrastruktur dasar, informasi dan akses.
- Kesenjangan sosial dan ekonomi
Perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah menyebabkan ketimpangan dalam pembentukan komunitas yang produktif dan inovatif.
- Akses teknologi pendidikan masih terbatas
Di beberapa wilayah pedesaan, fasilitas internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran daring masih minim dan lemah sinyal, sehingga ekosistem pembelajaran berbasis teknologi belum merata.
- Keterbatasan program pelatihan berkelanjutan
Program pelatihan untuk guru, tenaga pendidik, dan masyarakat masih belum konsisten, sehingga adaptasi terhadap metode pembelajaran modern berjalan lambat.
- Rendahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan
Kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan belum optimal, sehingga pengembangan ekosistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri masih terbatas.
- Keterbatasan teknologi pengawasan
Pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan sistem informasi keamanan masih terbatas pada area perkotaan, sementara wilayah pedalaman/pedesaan belum terjangkau.
- Jumlah aparat keamanan yang terbatas
Distribusi personel keamanan di daerah terpencil masih kurang, sehingga respons terhadap gangguan keamanan tidak selalu cepat.

Berdasarkan hasil analisa SWOT pada elemen *Smart Society* diatas, maka dilakukan Matriks TOWS/Strategi turunan yang dapat ditindaklanjuti.



Strategi S–O (Memaksimalkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang)

- Penguatan ekosistem pembelajaran digital.
Memanfaatkan akses internet yang meluas dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan platform edukasi berbasis teknologi. Program ini dapat melibatkan sekolah, komunitas, dan perguruan tinggi untuk menciptakan konten pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
- Kolaborasi multi pihak untuk inovasi sosial.
Mendorong kemitraan antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menciptakan aplikasi layanan bagi desa, sistem informasi kesehatan terpadu sampai kecamatan, dan platform partisipasi warga. Kolaborasi ini akan memperkuat inklusi digital dan meningkatkan kualitas layanan publik.
- Peningkatan literasi digital dan partisipasi warga.
Meluncurkan program literasi digital berbasis komunitas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, baik untuk pendidikan, usaha, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan publik melalui kanal digital.
- Integrasi layanan publik digital dan data terbuka.
Memanfaatkan SPBE dan portal layanan publik untuk menciptakan sistem yang transparan dan responsif. Integrasi data terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan.
- Pengembangan *smart community* berbasis teknologi.
Menggunakan teknologi seperti CCTV, IoT, dan sistem informasi keamanan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan publik, terutama di wilayah rawan bencana atau terpencil.

Strategi S–T (Menggunakan Kekuatan untuk Menahan Ancaman)

- Penguatan kapasitas SDM para ASN Pemda dan komunitas.
Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi ASN dan komunitas lokal terkait pengelolaan data, penanganan hoax, keamanan digital, dan inovasi layanan publik. Dengan demikian, ancaman rendahnya partisipasi dan keterbatasan kapasitas dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi.
- Integrasi layanan publik digital dengan mekanisme perlindungan sosial.
Mengembangkan layanan publik digital yang responsif dan terintegrasi dengan data terbuka untuk mempermudah akses bantuan sosial adaptif bagi komunitas rentan. Hal



ini akan mengurangi dampak kesenjangan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- Kolaborasi multi pihak untuk penguatan ketahanan sosial.
Memanfaatkan budaya gotong royong dan komitmen pemerintah untuk membangun sistem pengawasan berbasis teknologi (CCTV, IoT) di wilayah rawan bencana dan pedalaman. Kolaborasi dengan dunia usaha dan academia dapat memperkuat sistem keamanan dan respons cepat terhadap gangguan sosial maupun bencana.

Strategi W–O (Menutup Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)

- Memperluas akses teknologi dan infrastruktur digital
Memanfaatkan dukungan program nasional dan kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah terpencil. Pemerintah dapat menggandeng penyedia layanan telekomunikasi dan memanfaatkan CSR untuk penyediaan perangkat teknologi yang terjangkau.
- Penguatan sistem keamanan berbasis teknologi.
Memanfaatkan peluang inovasi teknologi seperti CCTV, IoT, dan sistem informasi keamanan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan publik, terutama di wilayah rawan bencana atau terpencil. Kolaborasi dengan academia dan dunia usaha dapat memperkuat sistem pengawasan dan respons cepat.

Strategi W–T (Mengurangi Kelemahan & Menghindari Ancaman)

- Membentuk pertahanan siber bersama
Menghadapi risiko polarisasi informasi dan hoaks di ruang digital, pemerintah bersama komunitas dan akademisi membangun sistem verifikasi informasi berbasis komunitas. Strategi ini memastikan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi tidak menjadi korban kejahatan siber atau manipulasi data, sehingga ketahanan sosial tetap terjaga di tengah transisi digital yang cepat.
- Literasi digital berbasis komunitas.
Meluncurkan program literasi digital yang menjangkau daerah pedesaan dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, dan CSR perusahaan. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi, keamanan digital, dan pemanfaatan layanan publik berbasis SPBE.



Dengan kombinasi infrastruktur digital, komitmen pemerintah, SDM adaptif dan kreatif, dan potensi pembelajaran serta membangun kemandirian bersama berbasis teknologi, sehingga Kabupaten Muara Enim memiliki kekuatan strategis untuk mewujudkan *Smart Society*. Transformasi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang inklusif, inovatif, berketahanan, dan berkelanjutan.

3.5.4 *Smart Economy*

Smart economy adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *smart economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

Strengths (Kekuatan)

- Kebijakan dalam RPJMD dan RPKD
Arah kebijakan yang jelas tercantum RPJMD 2025–2029 (visi MEMBARA) dan RPKD 2026 bertema pemantapan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing.
- Meningkatnya transaksi digital
Sudah banyaknya terjadi transaksi berbasis digital, termasuk *e-commerce* sampai ke pelosok daerah/pedesaan.
- Multisektor bisnis
Memiliki industri yang beragam, seperti tambang, minyak dan gas bumi, pelaku UMKM, koperasi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD ataupun pihak swasta.
- Peningkatan daya beli masyarakat
Program-program yang membantu peningkatan daya beli masyarakat dengan BLT, Bansos, Beasiswa, dan lainnya.
- Memiliki industri dan kegiatan ekonomi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan holtikultura.



Weaknesses (Kelemahan)

- Optimalisasi industri kecil dan menengah yang belum maksimal.
Kinerja di industri kecil dan menengah (IKM) masih memerlukan rumusan strategi yang lebih tajam untuk mengatasi kelemahan internal dan ancaman pasar agar dapat naik kelas secara berkelanjutan.
- Ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif.
Struktur ekonomi masih sangat didominasi oleh sektor pertambangan, sehingga diversifikasi ke industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan PDRB secara kualitatif.
- Kerentanan terhadap inflasi.
Daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, sangat rentan terhadap inflasi bahan pokok seperti beras dan cabai merah yang dapat menggerus hasil dari program pengentasan kemiskinan.
- Kualitas sumber daya pemuda.
Persentase pemuda yang memiliki sertifikasi keahlian melalui pelatihan masih menjadi fokus yang perlu ditingkatkan

Opportunity (Peluang)

- Hilirisasi tambang batubara dan energi.
Sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), terdapat peluang besar pada proyek gasifikasi batu bara menjadi DME dan pembangunan pembangkit listrik mulut tambang yang didukung oleh integrasi logistik baru mulai tahun 2026.
- Pengembangan kawasan industri terpadu.
Rencana pengembangan kawasan industri di Tanjung Enim seluas ribuan hektar membuka pintu bagi investor di sektor industri pengolahan yang berbasis pada potensi lokal seperti karet dan kelapa sawit.
- Sinergi antara BUMN dan Pemda.
Kolaborasi strategis dengan PT Bukit Asam (PTBA) dalam program inovasi dan keberlanjutan memberikan peluang bagi UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri besar.
- Program lapangan kerja baru.



Target penciptaan 10.000 lapangan kerja baru melalui sektor industri dan ekonomi kreatif menjadi peluang utama untuk menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan per kapita.

- Penyelarasan dengan program pusat (Asta Cita).
RKPD 2026 yang diselaraskan dengan program nasional memberikan peluang pendanaan dan dukungan teknis untuk penguatan ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi desa dan pengembangan koperasi merah putih.
- Digitalisasi transaksi keuangan:
Penguatan ekosistem transaksi digital melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dapat meningkatkan akuntabilitas dan mempercepat penyerapan anggaran belanja publik.

Threats (Ancaman)

- Adanya aktivitas tambang ilegal.
Meskipun penertiban terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian ESDM secara kontinyu, praktik tambang batu bara tanpa izin masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola industri lokal, keamanan lingkungan, dan stabilitas pasar energi.
- Risiko pencemaran dan kerusakan ekologi.
Industri manufaktur besar seperti bubur kertas dan pengolahan energi fosil membawa risiko polusi air dan tanah, dan dapat memicu konflik sosial dengan masyarakat sekitar jika standar lingkungan tidak dipenuhi secara ketat.
- Inflasi pangan yang fluktuatif.
Harga komoditas pokok seperti cabai merah, bawang merah, dan beras masih menjadi penyumbang utama inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat kelas bawah dan berisiko menaikkan kembali angka kemiskinan ekstrem.
- Ketimpangan pertumbuhan ekonomi: Meskipun PDRB Muara Enim menunjukkan angka positif, namun terdapat ancaman berupa tingginya angka kemiskinan di tengah kemakmuran sektor tambang, yang menunjukkan bahwa tetesan ekonomi (*trickle-down effect*) belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.
- Gap ketrampilan dan kebutuhan pemuda.
Kurangnya sinkronisasi antara keahlian tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri strategis (misalnya gasifikasi) dapat menyebabkan pengangguran terdidik dan memicu masalah sosial di daerah lingkaran tambang.



- Defisit anggaran pemerintah daerah.

Penurunan pendapatan dari pusat memaksa pemerintah daerah menyusun strategi untuk menutupi defisit, termasuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD agar proyek infrastruktur tetap berjalan.

Berdasarkan hasil analisa SWOT pada elemen *Smart Economy* diatas, maka dilakukan Matriks TOWS/Strategi turunan yang dapat ditindaklanjuti

Strategi S–O (Memaksimalkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang)

- Digitalisasi ekosistem ekonomi lokal
Memanfaatkan tren transaksi digital dan program ETPD untuk memperluas penerapan less-cash society di pasar tradisional, pelaku UMKM, dan layanan publik. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan sistem pembayaran digital dengan platform layanan daerah seperti aplikasi “Dulur Kito” untuk menciptakan ekosistem keuangan yang transparan dan efisien.
- Penguatan literasi keuangan dan inklusi digital.
Meluncurkan program pelatihan literasi keuangan berbasis komunitas dan sekolah, bekerja sama dengan perbankan, fintech, dan BUMN. Fokus pada edukasi penggunaan transaksi non-tunai, manajemen keuangan keluarga, dan pemanfaatan teknologi untuk usaha mikro agar masyarakat siap menghadapi ekonomi digital.
- Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal.
Mengembangkan sektor agro-processing (kopi Semendo, karet, sawit berkelanjutan) dan ekowisata berbasis alam untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kawasan industri terpadu dan dukungan program nasional untuk menarik investasi hijau yang mendukung keberlanjutan.
- Integrasikan UMKM ke rantai pasok industri besar.
Memanfaatkan kolaborasi dengan PTBA dan BUMN lainnya untuk membuka akses UMKM lokal ke rantai pasok industri melalui program kemitraan, pelatihan vokasi, dan sertifikasi produk. Hal ini akan meningkatkan daya saing UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Pemanfaatan infrastruktur energi bersih untuk ekonomi hijau.
Mengoptimalkan keberadaan PLTP Lumut Balai sebagai jangkar energi bersih untuk menarik investor industri hijau dan mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan.



Strategi ini sejalan dengan tren global menuju transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Strategi S–T (Menggunkan Kekuatan untuk Menahan Ancaman)

- *Shock responsive social protection dan price stabilization*
Mengkaitkan bantuan sosial /BLT dengan *early warning inflasi* (harmonisasi dngan data BPS dan OPD) untuk penyaluran adaptif (voucher pangan non-tunai saat harga komoditas melambung), sambil memperkuat cadangan beras daerah & operasi pasar.
- *Human capital transition program (Reskilling & Upskilling)*
Mendirikan sekolah Akademi Vokasi Energi & Logistik (kemitraan PTBA/PGEO, SMK/Politeknik) fokus kurikulum operator PLTP, K3 di industri, manufaktur ringan, dan manajemen logistik guna menyerap pemuda lokal ke sektor non-tambang dengan sertifikasi nasional.
- *Desa produktif & agro-processing inclusive growth*
Dorong hilirisasi pertanian (kopi Bintang/Semendo, karet, sawit berkelanjutan) melalui *processing hub* di kecamatan, akses peralatan bersama (mesin roasting/press), dan pembiayaan mikro untuk meningkatkan pendapatan petani/UMKM secara merata lintas wilayah.
- *Financial dan digital literacy hubs*
Dirikan *literacy hubs* berbasis desa/sekolah (kemitraan perbankan, fintech, BUMN) dengan kurikulum manajemen keuangan keluarga, keamanan digital, dan penggunaan kanal pembayaran; targetkan sertifikasi basic digital finance bagi ibu rumah tangga, petani, pedagang pasar.

Strategi W–O (Menutup Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)

- Dekonsentrasi ketergantungan ekstraktif melalui zona industri tematik.
Mengalokasikan sebagian lahan kawasan industri untuk klaster *agro-processing* dan manufaktur ringan (kemasan, perangkat sederhana), sehingga struktur ekonomi bergeser dari ekstraktif menuju pengolahan. Menggunakan momentum hilirisasi & pengembangan kawasan industri agar transisi lebih cepat.
- Memperkuat koperasi merah putih dan skema pembiayaan mikro
Memperkuat dan memperbanyak koperasi secara modern dan profesional sebagai aggregator pembelian bahan baku, pembiayaan alat produksi, dan pemasaran digital



untuk IKM/UMKM; manfaatkan peluang dukungan pusat & korporasi (CSR) untuk memperluas basis penerima manfaat secara merata lintas wilayah.

- *Tiered onboarding* dan insentif adopsi pembayaran digital secara luas
Tahapan penerapan: (i) QRIS di semua pelaku pasar tradisional, (ii) e-retribusi layanan publik, (iii) *integrasi closed-loop* bansos non-tunai (voucher/kartu/QR) di “Dulur Kito”. Berikan insentif biaya administrasi rendah, promo pasar, dan pelatihan pedagang untuk mempercepat adopsi.

Strategi W–T (Mengurangi Kelemahan & Menghindari Ancaman)

- Regimen “industrial integrity and clean production” berbasis kepatuhan ketat.
Terapkan *compliance pack* wajib untuk seluruh pelaku IKM dan industri (standardisasi mutu, K3, audit lingkungan, pelaporan berkala) sebagai prasyarat izin/kemitraan. Hal ini menutup celah kapasitas IKM sekaligus menghindari risiko polusi/konflik sosial yang sering memicu resistensi warga terhadap industri.
- Penataan zona industri tematik dan “*No-Tolerance*” terhadap praktik ilegal.
Dekonsentrasi dominasi ekstraktif dengan zona agro-processing/manufaktur ringan; paralel, bentuk gugus tugas lintas-OPD untuk penertiban tambang ilegal berbasis dashboard pengaduan publik agar insiden ilegal turun drastis. Ini mengurangi ketergantungan ekstraktif dan menghindari kerusakan lingkungan serta instabilitas pasar lokal.
- *Shielded supply chain* dengan klausul manfaat lokal dan protokol sosial
Masukkan klausul local content dan local hiring ditambah dengan SOP mediasi sosial ke seluruh kontrak industri untuk mencegah ketimpangan dan konflik. Onboarding UMKM/IKM ke rantai pasok dengan kurasi mutu menutup kekurangan kapasitas; klausul sosial menghindari gejolak saat siklus komoditas berubah.
- Kerangka fiskal kontinjensi.
Susun medium-term fiscal framework berbasis skenario komoditas (harga batubara naik/turun), mengalokasikan cadangan belanja untuk layanan esensial saat pendapatan pusat menurun—menghindari pemangkasan program kesejahteraan.
- Penyangga biaya transaksi untuk segmen rentan
Gunakan skema subsidi biaya layanan (fee QRIS/e-retribusi) dan promosi pasar terarah selama fase onboarding agar pengguna berpendapatan rendah tidak beralih kembali ke tunai saat inflasi naik.



3.5.5 *Smart Living*

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart Regency* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu: kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart Regency*.

Strengths (Kekuatan)

- Kemajuan kualitas hidup masyarakat.
Aspek kesehatan, sanitasi, dan lingkungan termasuk dalam delapan bidang yang dipantau untuk menilai kemajuan kualitas hidup masyarakat.
- Gerakan “jamban sehat” telah berhasil membangun lebih dari 1.556 unit WC sejak 2024. Akses jamban sehat kini mencapai 97,71%, menunjukkan perilaku higiene yang kuat.
- Sudah terdapat beberapa rumah sakit dan fasilitas medis daerah dan swasta.
 - RSUD dr. H. M. Rabain Muara Enim (RS tipe B, fasilitas lengkap)
 - RSUD Semende Darat Laut, RSUD Gelumbang, RSUD Lubai Ulu
 - RS swasta seperti RSIA Karunia Indah Medika dan RS Bukit Asam Medika
- Dinas Kesehatan (Dinkes Muara Enim) aktif menerapkan program preventif, promosi, kuratif, hingga rehabilitatif, termasuk vaksinasi, kampanye pola hidup sehat, penanganan stunting, dan penyakit menular serta tidak menular.
- Fokus perbaikan kualitas air bersih terus dilakukan meskipun masih terdapat tantangan kandungan zat besi dan H₂S pada beberapa sumber air, yang dapat berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jangka panjang.
- Kuantitas dan kualitas jaringan jalan.
Jaringan jalan kabupaten sepanjang 1.422,6 km, di mana hampir 70% beraspal dan sekitar 95% dalam kondisi baik pada 2024.
- Infrastruktur khusus sektor pertambangan juga dikembangkan.
Jalan khusus batubara sepanjang 118 km oleh PT Servo Lintas Raya, agar kendaraan berat tidak merusak jalan umum dan mengurangi kemacetan.



Weaknesses (Kelemahan)

- Penurunan kualitas lingkungan terutama kualitas air sungai.
Sungai Enim dan Niru dilaporkan mengalami pencemaran berat (warna keruh, bau menyengat) akibat limbah pertambangan dan industri.
- Limbah dari aktivitas industri berat juga mengganggu ekosistem air dan bahan makanan lokal.
- Kendala di penyediaan air bersih.
Penelitian menunjukkan tingginya kandungan besi, H₂S, dan bahan organik dalam sumber air lokal, yang berpotensi menyebabkan penyakit.
- Pencemaran pada sumber air berisiko membebani kesehatan masyarakat secara jangka panjang, meski program pencegahan lancar, masalah kualitas air tetap belum tertangani secara menyeluruh.
- Kerusakan jalan dan kemacetan.
Hal ini disebabkan kendaraan angkutan batu bara: Infrastruktur jalan umum sering rusak parah akibat muatan ODOL, menyebabkan kemacetan serta kerusakan fisik jalan.
- Keterbatasan kewenangan Dinas Perhubungan.
Hal ini karena kurangnya penertiban kendaraan berat yang melintas menyebabkan ketidakaturan lalu-lintas dan parkir sembarangan.

Opportunity (Peluang)

- Sistem transportasi berkelanjutan.
Kolaborasi PT KAI, PTBA & Pemprov untuk pembangunan flyover melengkapi visi transportasi ramah lingkungan, multimoda (kereta, jalan khusus, jalur alternatif), yang siap mendukung mobilitas komoditas dan mobilitas penduduk sekaligus mengurangi emisi dan kemacetan.
- Potensi ekspansi moda kereta api.
Adanya proyek jalan layang untuk integrasi ruas rel dan jalan memberi peluang transisi angkutan batubara ke moda kereta, sekaligus memperluas moda transportasi publik antarkabupaten dan meningkatkan konektivitas logistik.
- Jalan toll Muara Enim–Palembang.
Rencana penyambungan tol ini dipandang sebagai katalisator investasi, menurunkan biaya logistik, dan membuka potensi kawasan industri, pariwisata, dan UMKM baru.



Threats (Ancaman)

- Ketergantungan pada sektor pertambangan.
Aktivitas tambang batubara yang masif berpotensi mengganggu pola hidup sehat masyarakat karena pencemaran udara, air, dan tanah. Limbah tambang yang mencemari sungai (Enim, Niru) mengancam keberlanjutan sumber air bersih dan ekosistem perikanan lokal.
- Degradasi lingkungan.
Penurunan kualitas lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan untuk tambang dapat memicu bencana seperti banjir dan longsor, mengganggu kenyamanan hidup dan kesehatan masyarakat.
- Perubahan perilaku konsumsi.
Urbanisasi dan masuknya budaya instan (makanan cepat saji, rokok) berpotensi meningkatkan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.
- Risiko penyakit akibat pencemaran.
Kandungan zat besi, H₂S, dan bahan organik tinggi dalam air tanah berpotensi memicu penyakit kronis (stroke, rematik) jika tidak diatasi.
- Ancaman stunting dan gizi buruk.
Meski ada program pencegahan, ketergantungan ekonomi pada tambang dan fluktuasi harga pangan dapat mengganggu akses gizi seimbang.
- Keterbatasan tenaga medis di daerah terpencil.
Jika tidak diimbangi dengan distribusi tenaga kesehatan, akses layanan di pedesaan akan tetap rendah, memperbesar kesenjangan kesehatan.
- Kerusakan jalan akibat ODOL (*Over Dimension Over Load*).
Kendaraan angkutan batubara yang melintas di jalan umum menyebabkan kerusakan parah, meningkatkan biaya perbaikan dan risiko kecelakaan.
- Ketergantungan pada moda darat.
Minimnya diversifikasi moda transportasi (kereta, sungai) membuat distribusi barang rentan terganggu jika terjadi kerusakan jalan atau bencana alam.

Berdasarkan hasil analisa SWOT pada elemen *Smart Living* diatas, maka dilakukan Matriks TOWS/Strategi turunan yang dapat ditindaklanjuti.



Strategi S–O (Memaksimalkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang)

- Menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai norma melalui akselerasi PHBS dan kampanye komprehensif tentang masyarakat sehat.
- Meningkatkan ketahanan pangan & edukasi tentang makanan gizi.
- Peningkatan kualitas puskesmas berbasis akreditasi mutu & digitalisasi.
- Manajemen lalu lintas kota dan angkutan lokal.
- Sinkronisasi infrastruktur perdesaan dan pembiayaan multi-sumber

Strategi S–T (Menggunakan Kekuatan untuk Menahan Ancaman)

- Meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih masyarakat agar penyakit malaria dan infeksi saluran pernafasan yang tinggi dapat dikurangi.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah/Swasta agar terus terjaga dan modern dengan digitalisasi.
- Implementasi *telemedicine* dan unit layanan keliling untuk mengalihkan layanan primer dari puskesmas padat.
- Membangun cadangan kebutuhan pokok masyarakat dan memfasilitasi pasar murah sebagai *buffer* saat defisit pangan/harga tinggi.
- Memkampanyekan sadar kota (zero truk masuk kota dalam jam tertentu)
- Melakukan program penghijauan sebagai antitesis terhadap polusi angkutan berat.
- Penerapan dana multi-through financing: gabungkan skema dana desa, CSR, & bantuan provinsi/pusat dalam satu dashboard per proyek.

Strategi W–O (Menutup Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)

- Melakukan sji rutin sumber air desa/kota terhadap zat besi dan organik, jika melebihi ambang batas langsung lakukan intervensi filtrasi atau pompa sumur dalam.
- Integrasikan perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, edukasi gizi keluarga, serta kampanye tanpa rokok dan TB, untuk menurunkan prevalensi *stunting*.
- Simplifikasi prosedur admisi, kampanye pemanfaatan kartu JKN, dan tingkatkan kenyamanan layanan agar masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan secara optimal.
- Wujudkan forum lalu lintas angkutan jalan raya sebagai platform reguler koordinasi lintas institusi untuk kontrol angkutan, rekayasa lalu lintas, serta operasi bersama di banjir/kerusakan jalan bersama masyarakat/komunitas.



- Memuat skema pembiayaan berbasis multi-sumber untuk penguatan jalan dan drainase desa; dengan melibatkan CSR logistik untuk dukungan teknis dan peralatan dari swasta/BUMN.

Strategi W–T (Mengurangi Kelemahan & Menghindari Ancaman)

- Mengurangi ketergantungan pada sumber air terkontaminasi dan menahan dampak banjir yang kerap menginfeksi saluran air dan sanitasi.
- Menambah kapasitas digital dalam mitigasi sewaktu banjir agar komunikasi tetap terjaga dan lancar.
- Memperkuat kualitas dan kuantitas SDM Pemda yang terlibat langsung ketika terjadi banjir dan bencana alam.
- Membangun *satellite clinic* dan jadwal layanan keliling untuk lokus padat antrian; *appointment system* dan *fast track* bagi Kesehatan Ibu Anak, pelaksanaan Imunisasi–TB; *task shifting* ke perawat/bidan terlatih untuk skrining awal.
- Mencegah kembalinya truk berat ke jalan umum dan menekan laju kerusakan jalan kota dengan adanya komunikasi dan koordinasi terbuka bersama masyarakat dan komunitas serta penegakan hukum bagi yang masih melanggar.

3.5.6 Smart Environment

Smart Environment adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari smart environment di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Strengths (Kekuatan)

- Komitmen kelembagaan lingkungan yang kuat melalui Perbup No. 62/2024 yang membentuk UPTD Pengelolaan Sampah. Struktur ini mencerminkan perhatian nyata terhadap manajemen lingkungan secara profesional, terukur, dan akuntabel.



- Mengimplementasikan Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk meningkatkan kesadaran serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim—meliputi pemanfaatan biogas, efisiensi energi, pengendalian banjir.
- Melakukan penanaman pohon produktif. Langkah ini diperluas melalui edukasi pengelolaan sampah berbasis sekolah dengan lomba 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*), fotografi lingkungan, dan lomba mendongeng yang menargetkan generasi muda sebagai agen perubahan.
- Pada peringatan World Cleanup Day, Pemkab dan DLH mengadakan aksi pembersihan massal di Hutan Kota Sungai Aur (Oktober 2025), melibatkan berbagai komunitas masyarakat. Kegiatan ini membuktikan pengarusutamaan budaya gotong royong dalam pelestarian ruang publik.
- Melalui Kerjasama KADIN–Australia Green Wafe, pemerintah mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi *Refuse-Derived Fuel (RDF)*, mengubah sampah non-organik menjadi energi terbarukan. Ini membuka peluang pengelolaan limbah ekonomi sirkular dan mengurangi beban TPA.
- Kerjasama antara DLH, Dinas Perikanan, dan SEAFDEC–IFRDMD mendukung pengelolaan sumber daya perikanan air tawar berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas riset, dan co-management sektor ikan tawar di wilayah Muara Enim (melalui program dan monitoring hingga 2029). Kolaborasi ini memperkuat konservasi ekologis dan kesejahteraan nelayan lokal.

Weaknesses (Kelemahan)

- Pencemaran perairan di Sungai Enim dan Lematang.
Penelitian menunjukkan peningkatan tingkat pencemaran dalam Sungai Enim: parameter seperti TSS, BOD, COD, Fe, Cu, minyak dan lemak melebihi baku mutu air kelas II. Indeks pencemaran naik dari 1,43–2,47 (2018) menjadi 1,49–3,85 (2023), mengindikasikan sungai kini tergolong *lightly polluted*.
- Aktivitas tambang dan limbah domestik turut mencemari sungai Lematang—masyarakat melaporkan air keruh, bau menyengat, dan kadar COD jauh melebihi ambang baku mutu (60 mg/L vs limit 25 mg/L).
- Deforestasi dan hilangnya tutupan hutan yang diakibatkan aktivitas pertambangan.
- Kerusakan lahan akibat pasca tambang.



- Manfaat ekonomi tidak sebanding dengan kerusakan ekologis dengan masih rendahnya kesejahteraan sosial pekerja tambang dan masyarakat secara umumnya.

Berdasarkan hasil analisa SWOT pada elemen *Smart Environment* diatas, maka dilakukan Matriks TOWS/Strategi turunan yang dapat ditindaklanjuti.

Strategi S–O (Memaksimalkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang)

- Kabupaten Muara Enim sudah relatif lebih baik dalam infrastruktur digital, sehingga dapat meingkatkan teknologi internet dalam pemantauan kerusakan lingkungan (drone,IoT/CCTV).
- Kemitraan antara Pemda dengan segenap perusahaan tambang dalam mendapatkan CSR untuk kepentingan perbaikan kerusakan alam dan lingkungan pasca tambang.
- Mengembangkan teknologi tepat guna bersama perusahaan/BUMN/pemerintah pusat agar dapat mengolah sampah dalam konteks *circular economy*.
- Pengembangan perikanan berkelanjutan, diversifikasi pendapatan nelayan, transfer teknologi dengan kolaborasi bersama SEAFDEC/IFRDMD, adanya pusat konservasi SPEECTRA.
- Pembelajaran lingkungan digital, advokasi berbasis data, generasi muda dan juga pemberdayaan komunitas sebagai agen perubahan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi S–T (Menggunakan Kekuatan untuk Menahan Ancaman)

- Penguatan pengawasan lingkungan berbasis digital.
Melakukan integrasikan data ke portal publik agar transparan dan mencegah manipulasi oleh pihak industri.
- Mempromosikan pariwisata hijau.
Promosikan desa ramah lingkungan dan reklamasi tambang sebagai destinasi ekowisata untuk menarik potensi investasi hijau bukan berbasiskan tambang.
- Edukasi dan literasi lingkungan digital.
- Mengintegrasikan modul lingkungan ke sekolah digital dan platform Desa Digital MEMBARA dengan melibatkan generasi muda dalam *citizen science* untuk pemantauan kualitas lingkungan.
- Pengelolaan limbah dan polusi dengan teknologi tepat guna.



- Mendorong inovasi energi terbarukan dari limbah plastik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Strategi W–O (Menutup Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)

- Program rehabilitasi kolaboratif berbasis data.
Menutup celah deforestasi dengan target rehabilitasi tahunan lintas-korporasi dan integrasi data tutupan lahan ke dashboard smart regency (memantau titik rawan, progres tanam & survival rate bibit).
- Kemitraan dengan lokal.
Memperluas kemitraan jasa lingkungan lokal (UMKM pembibitan, kelompok tani hutan) sebagai pelaksana reklamasi—didukung standar teknis dari perusahaan tambang agar terjadi transfer pengetahuan dan pembiayaan yang berkelanjutan.
- Membentuk konsorsium reklamasi lintas-pelaku (perusahaan–desa–UMKM–DLH) dengan KPI bersama (luas, kualitas tanah, keanekaragaman hayati).
- Meningkatkan skala keterlibatan UMKM jasa reklamasi (pembibitan, pemeliharaan) menggunakan pipeline kebutuhan bibit perusahaan—menutup kelemahan kapasitas finansial dan teknis warga sekaligus menyerap peluang pasar reklamasi,
- Memasang stasiun sensor sungai pada titik kritis (inlet AAT, hilir pemukiman) dan tetapkan ambang batas dinamis; bila terlampaui, maka sistem mengirim alert ke DLH & perusahaan untuk tindakan korektif.
- Membentuk Forum Sungai Cerdas (DLH–KKP–desa–perusahaan) menggunakan data bersama untuk menetapkan rencana pemulihan (pengolahan AAT, penahan sedimen, riparian buffer).
- Mengembangkan mekanisme kompensasi berbasis data (kerusakan ekologis–lahan) dan restorasi habitat dengan melibatkan kelompok nelayan & pembudidaya (link ke program SEAFDEC).
- Membentuk Akademi Lingkungan Digital (program sertifikasi cepat untuk perangkat desa/ASN) memanfaatkan platform Google for Education dan modul smart regency.

Strategi W–T (Mengurangi Kelemahan & Menghindari Ancaman)

- Membentuk kawasan lindung dan reklamasi ketat untuk menghindari degradasi lahan.
Mengurangi kelemahan tutupan hutan rendah dan lahan kritis sambil menghindari ancaman deforestasi lanjutan dan banjir/erosi.



- Pengawasan kualitas sungai secara real time untuk mencegah kegagalan mutu. Menutup kelemahan pengendalian kualitas air dan menghindari ancaman lonjakan beban pencemar.
- Penguatan SDM dan koordinasi lintas-OPD. Menjalankan Akademi Lingkungan Digital untuk perangkat desa/ASN (modul *e-governance* lingkungan, analitik sensor, SOP insiden) memanfaatkan jaringan pendidikan digital yang sudah bergulir dengan *Google for Education*.
- Mengembangkan sirkular ekonomi sampai tingkat pedesaan. Mengintegrasikan pelaporan sampah dan jadwal angkut ke aplikasi desa (Desa Digital MEMBARA) untuk menghindari penumpukan dan pembuangan liar di bantaran

3.6 Peta jalan pembangunan Muara Enim *Smart Regency*

Pada dekade mendatang, Kabupaten Muara Enim berdiri di persimpangan sejarah antara warisan masa lampau yang kaya dan masa depan yang penuh peluang serta tantangan. Sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam, pertanian, dan budaya yang besar, transformasi menuju konsep "kabupaten cerdas" (*smart regency*) bukanlah sekadar pilihan teknologi, melainkan sebuah imperatif strategis untuk mencapai keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kelestarian lingkungan. Peta jalan sepuluh tahun ini dirancang dengan semangat bahwa "pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan tentang manusia, harapan, dan keadilan sosial".

Oleh karena itu, kerangka Muara Enim *Smart Regency* 2036 dibangun di atas enam pilar yang saling terkait. Keenamnya diintegrasikan dalam sebuah pendekatan holistik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, dengan teknologi sebagai alat pemercepat dan pemerataan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan, studi praktik terbaik, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Narasi akan dibagi menjadi tiga fase implementasi: Fase Fondasi (2026-2028), Fase Akselerasi (2029-2032), dan Fase Konsolidasi & Kemandirian (2033-2036). Setiap pilar *smart city* akan dijabarkan dalam ketiga fase tersebut, dilengkapi dengan program kunci, indikator keberhasilan (Key Performance Indicators/KPI), dan lembaga penanggung jawab.

Sehingga Peta jalan pembangunan *smart regency* di Muara Enim dalam 10 tahun mendatang adalah sebagai berikut:.



1. *Smart Governance*

Tata kelola yang cerdas adalah tulang punggung seluruh transformasi. Pilar ini fokus pada penciptaan pemerintahan yang terbuka, efisien, responsif, dan berbasis data.

Fase Fondasi (2026-2028): Membangun Sistem Digital dan Kultur Data

- Program CERDAS Muara Enim (Pelayanan Publik Digital Terpadu): Mengadopsi dan mengadaptasi program CERDAS dari tingkat provinsi untuk menciptakan portal dan aplikasi pelayanan publik terpadu. Target: 50 jenis pelayanan (SKU, perizinan, pengaduan) dapat diakses online melalui satu pintu.
- *Command Center* 1.0: Membangun pusat kendali data awal di Bappeda yang mengintegrasikan data kependudukan, pertanahan, dan ekonomi dasar. Berfungsi untuk pemantauan proyek dan analisis awal.
- Pelatihan Massal Aparatur Sipil Negara (ASN): Literasi digital dan etika pelayanan publik menjadi pelatihan wajib bagi seluruh ASN.
- KPI: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) online naik 25%; waktu tunggu rata-rata perizinan turun 40%.

Fase Akselerasi (2029-2032): Integrasi, Partisipasi, dan Prediktif

- Muara Enim Integrated Data Lake: Mengembangkan danau data yang mengkonsolidasikan informasi dari semua OPD, ditambah data real-time dari sensor (lalu lintas, lingkungan).
- Platform Partisipasi Publik "ENIM Sapa": Platform digital untuk konsultasi publik, anggaran partisipatif, dan pengumpulan aspirasi berbasis lokasi.
- Governance Predictive Analytics: Menerapkan analitik prediktif untuk bidang prioritas seperti prediksi kerawanan pangan, potensi konflik sosial, dan kebutuhan kesehatan di suatu wilayah.
- KPI: 80% kebijakan daerah melibatkan masukan dari platform partisipasi; akurasi prediksi kebutuhan logistik bantuan sosial mencapai 85%.

Fase Konsolidasi (2033-2036): Pemerintahan Otonom dan Blockchain

- AI-Driven Policy Simulator: Alat simulasi kebijakan berbasis AI untuk menguji dampak suatu rancangan peraturan sebelum diterbitkan.
- Blockchain untuk Pelayanan dan Transparansi: Menerapkan teknologi blockchain untuk pencatatan tanah, rantai pasok bantuan sosial, dan logistik pemerintah untuk memastikan keamanan dan anti-korupsi.
- Open Data & API Economy: Seluruh data publik (anonim) dibuka sepenuhnya (open data) untuk mendorong inovasi dari akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil.



- KPI: 100% transaksi keuangan daerah tercatat di sistem blockchain; tercipta minimal 10 startup lokal yang memanfaatkan API data pemerintah.

2. *Smart Branding*

Smart Branding adalah tentang membangun narasi identitas Kabupaten Muara Enim yang kuat, autentik, dan dikomunikasikan secara strategis melalui kanal digital untuk menarik investasi, wisatawan, dan talenta.

Fase Fondasi (2026-2028): Mendefinisikan Identitas dan Platform Dasar

- Proyek "DNA Muara Enim": Melakukan riset mendalam bersama komunitas, budayawan, dan pelaku usaha untuk merumuskan kembali nilai, keunikan, dan janji (brand promise) kabupaten. Fokus pada narasi "Pusaka Alam, Kreativitas Muda".
- Pembangunan Ecosystem Digital Branding: Membuat website pariwisata dan investasi yang responsif, serta mengaktifkan dan mengelola konten secara profesional di platform media sosial utama (Instagram, YouTube, TikTok) dengan strategi konten yang terencana.
- Pelatihan Digital Branding untuk Pelaku Kunci: Workshop bagi pelaku UMKM, pemandu wisata, dan aparatur desa sebagai duta branding.
- KPI: Pencarian online terkait "wisata Muara Enim" meningkat 100%; engagement rate media sosial pemerintah naik 300%.

Fase Akselerasi (2029-2032): Konten Immersive dan Pengalaman Digital

- Muara Enim Virtual Experience: Mengembangkan tur virtual 360° dan konten augmented reality (AR) untuk situs budaya, geopark, dan museum.
- Festival Tahunan "Enim Art & Innovation Festival": Menciptakan event tahunan berskala nasional yang memadukan seni tradisi, teknologi, dan ekonomi kreatif untuk menjadi puncak kalender branding.
- Program "Branding Ambassador": Merekrut influencer lokal dan nasional, serta traveler untuk program familiarization trip yang menghasilkan konten autentik.
- KPI: Festival menarik 50.000 pengunjung; konten virtual experience diakses dari 50 negara berbeda.

Fase Konsolidasi (2033-2036): Brand sebagai Platform Kolaborasi Global

- Co-Branding dengan Kota/Region Internasional: Menjalinkan kemitraan branding dengan daerah di luar negeri yang memiliki karakter serupa (pertambangan yang bertransformasi, daerah agrikultur teknologi tinggi).



- Marketplace Digital "Pusaka Enim": Platform e-commerce khusus yang menjual produk kerajinan, kopi, dan produk unggulan lainnya dengan standar dan cerita (storytelling) yang kuat.
- Reputasi sebagai "Living Lab": Membranding Muara Enim sebagai tempat uji coba (living lab) untuk solusi teknologi pertanian cerdas (smart agriculture) dan energi terbarukan, menarik peneliti dan startup global.
- KPI: Nilai ekspor melalui marketplace digital tumbuh 20% per tahun; mendapatkan 5 kemitraan riset internasional sebagai living lab.

3. **Smart Economy**

Smart Economy bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang beragam, tangguh, berbasis inovasi, dan memberikan nilai tambah tinggi, dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Fase Fondasi (2026-2028): Digitalisasi UMKM dan Penguatan Ekosistem Dasar

- Program "UMKM Naik Kelas Digital": Workshop dan pendampingan intensif digital branding, pemasaran online, dan keuangan digital untuk 1000 pelaku UMKM prioritas.
- BANK HARKAT Muara Enim: Meluncurkan skema pembiayaan mikro dengan bunga rendah dan syarat ringan bagi UMKM yang telah mengikuti pelatihan digital, bekerja sama dengan perbankan lokal dan OJK.
- Sentra Kreatif Digital (RUMEL Muara Enim): Membangun ruang kolaborasi (co-working space) dengan akses internet cepat dan fasilitas prototyping untuk anak muda, mirip dengan Program RUMEL di Jambi.
- KPI: 30% UMKM terdampingi berhasil masuk platform e-commerce nasional; penyaluran pembiayaan BANK HARKAT mencapai Rp 50 miliar.

Fase Akselerasi (2029-2032): Pertumbuhan Sektor Baru dan Kemandirian Pangan Digital

- Pengembangan Ekosistem Gig Economy & AI: Menyelenggarakan pelatihan "Gig Economy untuk Gen Z" yang berfokus pada keterampilan digital seperti manajemen konten, pemrograman dasar, dan analisis data, menyasar generasi muda sebagai motor penggerak ekonomi baru.
- AI Open Innovation Challenge Muara Enim: Menyelenggarakan kompetisi tahunan untuk menjangkau ide dan talenta di bidang AI, khususnya untuk solusi pertanian, kehutanan, dan energi.
- Platform Pertanian Digital "ENIM TANI": Mengintegrasikan data cuaca, harga pasar, teknik budidaya, dan akses pembiayaan dalam satu aplikasi untuk petani.



- KPI: Terbentuk talent pool 500 pekerja lepas (freelance) terampil digital; platform ENIM TANI digunakan oleh 30% kelompok tani.

Fase Konsolidasi (2033-2036): Ekonomi Hijau dan Industri 4.0 Lokal

- Industrial Park Teknologi Hijau: Mengembangkan kawasan industri berbasis teknologi bersih (clean technology) yang memanfaatkan produk sampingan atau limbah sektor tradisional (sawit, pertambangan) menjadi produk baru.
- Komoditas Berjejaring dan Smart Supply Chain: Menerapkan Internet of Things (IoT) dan blockchain untuk rantai pasok komoditas unggulan (kopi, karet, sapi) dari petani hingga eksportir, menjamin kualitas dan keuntungan yang adil.
- Venture Capital Daerah "Muara Enim Innovation Fund": Membentuk dana ventura yang diinisiasi pemerintah daerah bersama investor untuk menyuntikkan modal ke startup-startup lokal yang berpotensi tinggi.
- KPI: Ekspor produk olahan hijau meningkat 50%; Venture Capital menginvestasikan dana pada 5 startup unicorn potensial asal Muara Enim.

4. *Smart Society*

Smart Society adalah masyarakat yang inklusif, memiliki literasi tinggi, kolaboratif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan, dengan generasi mudanya sebagai penggerak utama.

Fase Fondasi (2026-2028): Penyambungan Digital dan Pendidikan Dasar

- Muara Enim Broadband Initiative: Memastikan akses internet broadband berkecepatan memadai mencapai seluruh ibu kota kecamatan dan desa-desa berpotensi.
- Digital Literacy for All: Kampanye dan pelatihan melek digital untuk kelompok rentan (ibu rumah tangga, pedagang pasar tradisional, lansia) tentang transaksi digital aman dan akses informasi.
- Kurikulum Muatan Lokal "Teknologi & Kearifan Lokal": Memasukkan materi coding dasar, etika digital, dan pemanfaatan teknologi untuk melestarikan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah menengah.
- KPI: 90% wilayah kecamatan terjangkau internet stabil; 50% sekolah menengah pertama menerapkan kurikulum muatan lokal digital.

Fase Akselerasi (2029-2032): Pemberdayaan Komunitas dan Talenta

- Community Innovation Hub: Membangun pusat inovasi komunitas di setiap kecamatan, dilengkapi perpustakaan digital, ruang diskusi, dan alat pembuatan konten sederhana.



- Program "Muara Enim Muda Kreatif": Beasiswa dan program mentorship untuk anak muda di bidang teknologi, seni, dan kewirausahaan sosial, bekerja sama dengan perusahaan teknologi nasional.
- Platform "Gotong Royong Digital": Aplikasi untuk mempertemukan kebutuhan sosial di masyarakat (contoh: perbaikan fasilitas umum, bantuan untuk warga sakit) dengan relawan dan sumber daya.
- KPI: Setiap kecamatan memiliki minimal 5 komunitas aktif berbasis minat yang difasilitasi hub; program beasiswa menghasilkan 100 lulusan siap kerja di sektor digital setiap tahun.

Fase Konsolidasi (2033-2036): Masyarakat Pembelajar dan Inklusif

- Lifelong Learning Platform: Platform online yang menawarkan kursus mikro (micro-credentials) dari berbagai bidang, bekerja sama dengan universitas dan perusahaan, yang dapat diakses secara gratis atau murah oleh seluruh warga.
- Teknologi Asistif untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia: Mengintegrasikan teknologi bantu (voice command, aplikasi navigasi khusus) dalam pelayanan publik dan fasilitas umum.
- Sistem Pengakuan Kompetensi Informal: Membuat sistem yang mampu mengakui dan memberikan sertifikasi bagi keterampilan yang diperoleh secara otodidak atau non-formal (digital marketing, programming).
- KPI: 20% populasi dewasa aktif di platform pembelajaran sepanjang hayat; semua gedung pelayanan publik dilengkapi teknologi asistif dasar.

5. **Smart Living**

Smart Living berfokus pada peningkatan kualitas hidup sehari-hari warga melalui lingkungan hunian yang aman, sehat, nyaman, dan didukung layanan cerdas.

Fase Fondasi (2026-2028): Layanan Dasar yang Responsif

- Sistem Tanggap Darurat dan Bencana Terintegrasi: Mengintegrasikan nomor panggilan darurat (115, 113) dengan Command Center dan sistem peringatan dini berbasis SMS/lokal.
- Aplikasi "ENIM Sehat": Aplikasi untuk konsultasi kesehatan dasar (telemedicine), pemantauan posyandu, dan pencatatan riwayat kesehatan digital sederhana.
- Smart Street Lighting Pilot Project: Menerapkan penerangan jalan umum berbasis LED dengan sensor di kawasan perkotaan Muara Enim untuk menghemat energi dan meningkatkan keamanan.



- KPI: Waktu respons rata-rata layanan darurat berkurang 30%; 40% keluarga dengan balita menggunakan fitur pemantauan posyandu di aplikasi.

Fase Akselerasi (2029-2032): Mobilitas Cerdas dan Kesehatan Presisi

- Sistem Informasi dan Manajemen Transportasi (SIMTRANS): Aplikasi yang memberikan informasi real-time tentang jadwal dan rute angkutan umum, serta integrasi pembayaran nontunai.
- Smart Health Center (Puskesmas Cerdas): Melengkapi 5 puskesmas percontohan dengan alat diagnosa terkoneksi (EKG portabel, pemeriksaan gula darah digital) yang datanya langsung masuk ke rekam medis pasien di aplikasi ENIM Sehat.
- Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas dengan Teknologi: Menerapkan sistem pemilahan dan penjemputan sampah terjadwal dengan bantuan aplikasi di tingkat kelurahan/desa.
- KPI: Pengguna angkutan umum meningkat 15%; waktu tunggu di puskesmas percontohan berkurang 50%.

Fase Konsolidasi (2033-2036): Kota Manusiawi dan Berketahanan

- Pengembangan Kawasan Pejalan Kaki dan Hijau (Green Corridor): Merancang ulang pusat kota dengan prioritas pejalan kaki, sepeda, dan ruang terbuka hijau yang terhubung.
- Personalized Wellness & Preventive Care: Mengembangkan layanan kesehatan berbasis data dan AI untuk rekomendasi gaya hidup pencegahan penyakit sesuai profil genetik dan aktivitas individu (dengan persetujuan penuh).
- Smart Home for Elderly Pilot: Kemitraan dengan pengembang untuk menyediakan unit rumah susun atau perumahan dengan sensor monitoring kesehatan dan keamanan untuk lansia hidup mandiri.
- KPI: Ruang terbuka hijau publik meningkat menjadi 30% luas wilayah perkotaan; angka partisipasi dalam program wellness mencapai 25% populasi dewasa.

6. **Smart Environment**

Smart Environment memastikan pembangunan berjalan beriringan dengan pelestarian dan pemulihan ekosistem, menggunakan teknologi untuk monitoring, konservasi, dan ekonomi sirkular.

Fase Fondasi (2026-2028): Pemantauan dan Pengetahuan



- Jaringan Sensor Kualitas Lingkungan: Menempatkan sensor kualitas udara (PM2.5) dan air di titik-titik strategis (kawasan industri, sungai) yang datanya terbuka untuk publik.
- Sistem Informasi Geografis (SIG) Sumber Daya Alam Terpadu: Memetakan dan memperbarui data tutupan lahan, daerah aliran sungai (DAS), dan titik rawan bencana (longsor, kebakaran hutan) secara digital.
- Program "Sekolah Adiwiyata Digital": Memperkuat program sekolah adiwiyata dengan modul digital tentang perubahan iklim dan alat monitoring sederhana untuk kebersihan sekolah.
- KPI: Data kualitas udara dan air dapat diakses real-time oleh publik; 100% perencanaan tata ruang berbasis SIG terbaru.

Fase Akselerasi (2029-2032): Mitigasi dan Ekonomi Sirkular

- Early Warning System untuk Bencana Hidrometeorologi: Mengembangkan sistem peringatan dini banjir dan tanah longsor berbasis prediksi cuaca dan data curah hujan real-time di DAS prioritas.
- Waste-to-Resource Center: Membangun pusat pengolahan sampah terpadu dengan teknologi pengomposan, daur ulang plastik, dan potensi pembangkit listrik skala kecil dari gas metana.
- Skema Insentif untuk Pertanian Berkelanjutan: Memberikan insentif (pembiayaan, sertifikasi) bagi petani yang menerapkan precision farming untuk menghemat air dan mengurangi pupuk kimia.
- KPI: Waktu tanggap peringatan dini bencana meningkat menjadi 3 jam sebelumnya; 30% sampah perkotaan terolah di Waste-to-Resource Center.

Fase Konsolidasi (2033-2036): Regenerasi dan Kemandirian Energi

- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat & Drone: Memanfaatkan drone untuk pemantauan dan penanaman bibit di area yang sulit dijangkau, melibatkan kelompok masyarakat setempat.
- Muara Enim Green Energy Grid: Mengembangkan jaringan energi lokal yang menggabungkan sumber energi terbarukan (mikrohidro, surya atap, biogas) untuk mencukupi kebutuhan listrik fasilitas publik dan industri kecil.
- Carbon Trading & Ecosystem Services Platform: Membuat platform untuk menghitung dan memperdagangkan kredit karbon dari proyek-proyek reforestasi dan energi bersih di Muara Enim.
- KPI: 5000 hektar lahan kritis direhabilitasi; 20% konsumsi energi pemerintah daerah berasal dari grid hijau lokal.



Tata Kelola Program

Peta jalan ini akan dikelola bersama perwakilan Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Informatika (sebagai koordinator) dan pimpinan OPD teknis terkait; yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Telah ada juga sebuah Dewan Penasihat *Smart Regency* yang beranggotakan akademisi, praktisi teknologi, tokoh masyarakat, dan perwakilan dunia usaha untuk memberikan masukan independen.

3.7 Rencana aksi pembangunan Muara Enim *Smart Regency*

Rencana aksi dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menentukan langkah-langkah penting menuju *Smart Regency*, mulai dari perencanaan sampai ke aksi. Rencana aksi tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu:

- Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *Smart Regency*,
- Pembangunan dan pembangunan infrastruktur utama *Smart Regency*,
- Pemantauan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *Smart Regency*,
- Rencana Penguatan Literasi *Smart Regency*.
- Program dan kegiatan OPD pelaksana *Smart Regency*.

Rencana aksi *Smart Regency* Kabupaten Muara Enim dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan hukum dan kelembagaan *Smart Regency*

Pengembangan kebijakan Kabupaten Muara Enim diwujudkan dalam 4 perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Dan pengembangan kebijakan ini diarahkan pada optimalisasi, fungsi koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien secara berkualitas, transparan, dan akuntabel.

- Penyusunan program perencanaan pembangunan *Smart Regency*
- Penataan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan *Smart Regency*
- Penyusunan perencanaan tata ruang untuk mendukung penataan wajah Kabupaten
- Monitoring dan evaluasi pada kegiatan pembangunan *Smart Regency*
- Peningkatan implementasi standar layanan pemerintah kepada publik
- Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mendukung *Smart Regency*



- Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam dan luar negeri dalam mewujudkan *Smart Regency*
- Pengembangan kompetensi ASN yang handal untuk mensukseskan *Smart Regency*

2. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur utama *Smart Regency*

- Pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan yang memberikan kenyamanan mobilitas masyarakat
- Pengelolaan dan peningkatan kualitas tata kota
- Pembangunan sekolah-sekolah berkualitas dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi (minimal sekolah vokasi)
- Pengelolaan dan peningkatan ruang terbuka hijau dan ramah anak
- Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat
- Peningkatan sistem manajemen transportasi yang memberikan kenyamanan transportasi bagi masyarakat dan ramah lingkungan
- Penyediaan Sarana Konservasi Energi dan Pemanfaatan energi alternatif
- Pengembangan infrastruktur TIK yang mencakup bandwidth, fiber optic, server, *CCTV, storage, dan switch* untuk mempercepat akses dan meningkatkan keamanan dalam pelayanan publik
- Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan cagar budaya
- Pengembangan kuantitas dan kualitas destinasi wisata sampai tingkat pedesaan
- Pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan & hortikultura, dan peternakan dan perikanan
- Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas gedung pemuda dan olahraga
- Penyediaan dan perawatan sarana perpustakaan daerah dan taman bacaan masyarakat
- Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan optimal kepada masyarakat
- Pengembangan fasilitas untuk kepentingan umum
- Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu
- Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung energi terbarukan



3. Pemantauan aplikasi dan perangkat lunak pendukung Smart *Regency*

Keberadaan aplikasi dan perangkat lunak adalah tulang punggung pembangunan kabupaten cerdas yang akan mengubah kabupaten menjadi ekosistem digital yang efisien melalui integrasi teknologi seperti IoT, AI, dan Big Data. Yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim harus selektif secara aman dan terukur dalam menggunakan jumlah aplikasi dan perangkat lunak, yang dikelola dan diawasi oleh Diskominfo. Adapun pemantauan tersebut antara lain:

- Aplikasi dasar/utama dalam setiap OPD, sebagai platform dasar aplikasi yang ada di masing-masing Dinas atau SKPD agar tidak saling tumpang tindih.

Tabel 3.12
Daftar aplikasi aktif yang digunakan di Pemerintah Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Nama Aplikasi	SKPD	Status
1	e-presensi	BKPSDM	Aktif
2	e-kinerja	BKPSDM	Aktif
3	e-Layanan	BKPSDM	Aktif
4	Sistem Informasi Manajemen Pegawai	BKPSDM	Aktif
5	Sistem Informasi Ujian Online (sijon)	Diskominfo SP	Aktif
6	Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Hukum	Aktif
7	e-Pajak Bumi Bangunan	Bapenda	Aktif
8	e-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Bapenda	Aktif
9	e-9Pajak Daerah	Bapenda	Aktif
10	e-Loker	Disnakertrans	Aktif
11	e-PPID	Diskominfo SP	Aktif
12	sialap-dpmptsp	DPM-PTSP	Aktif
13	sipintupintar-dpmptsp	DPM-PTSP	Aktif
14	sijaru-dpmptsp	DPM-PTSP	Aktif
15	sifokus-dpmptsp	DPM-PTSP	Aktif
16	silepek-dpmptsp	DPM-PTSP	Aktif
17	SKM DPMPTSP	DPM-PTSP	Aktif
18	Siantri DPMPTSP	DPM-PTSP	Aktif
19	Tanda Tangan Elektronik	Diskominfo SP	Aktif
20	Investment	DPM-PTSP	Aktif
21	DPPKB	DPPKB	Aktif
22	SIMKOP UKM	DINKOP UKMK	Aktif
23	OJS	Balitbangda	Aktif
24	JISS	Balitbangda	Aktif
25	Tere (Desa Tegal Rejo)	Desa Tegal Rejo	Aktif
26	Inlislite (Perpustakaan)	Disperpus	Aktif



No	Nama Aplikasi	SKPD	Status
27	SAKIP	Bappeda	Aktif
28	SISTER	Diskominfo SP	Aktif
29	Satu Data	Diskominfo SP	Aktif
30	DB Dikbud	Disdikbud	Aktif
31	e-Report PBJ	Bagian ULP	Aktif
32	Sistem Pengelolaan Manajemen dan Pemetaan Aset Daerah (SPMPAD)	BPKAD	Aktif
33	Posting Cinta	DKP	Aktif
34	SI Monev	Diskominfo SP	Aktif
35	Agenda	Bagian Prokopim	Aktif
36	KMS Inovasi	Balitbangda	Aktif
37	Sinome	Balitbangda	Aktif
38	Aruna AI	Diskominfo SP	Aktif
39	Content Management System Muara Enim (CMS Mekab)	Diskominfo SP	Aktif
40	Bantuan Asuransi Kematian Rakyat (Asmara Membara)	Dinsos	Aktif

4. Rencana penguatan literasi *Smart Regency*

Penguatan literasi Smart City adalah fondasi krusial untuk mewujudkan kota cerdas yang benar-benar melayani warganya, dengan membekali masyarakat kemampuan memahami, menggunakan, dan berpartisipasi aktif dalam ekosistem digital kota, mulai dari literasi digital dasar hingga literasi data, agar teknologi seperti IoT dan AI dapat dioptimalkan untuk layanan publik yang efisien, peningkatan kualitas hidup, dan pengambilan keputusan cerdas, bukan hanya sebatas infrastruktur teknologi semata, melaking menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan, seperti:

- Publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah melalui multimedia
- Sarana edukasi penunjang wisata daerah
- Pembinaan pemanfaatan para komunitas dan masyarakat
- Pengembangan budaya baca dan pengembangan perpustakaan
- Penyelenggaraan pembelajaran sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan dan publik
- Fasilitasi pelatihan seni budaya lokal dan seni musik
- Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
- Pelatihan pencegahan dan pengurangan risiko bencana serta bahaya kebakaran
- Pengembangan keterampilan dan kewirausahaan pemuda
- Pelatihan usaha olahan pangan, produk oleh-oleh, kuliner, desain dan fashion

- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja
- Fasilitasi dan pendampingan inkubasi usaha mandiri
- Penyelenggaraan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan dan kebencanaan.

5. Program dan kegiatan OPD pelaksana Smart Regency

Dalam implementasi pembangunan *smart regency*, sangat penting untuk ditunjukkan secara nyata melalui program dan kegiatan para OPD yang terkait dengan masing-masing dimensi. Berikut ini ditampilkan program dan kegiatan yang sudah disinkronkan yang berbasis RPJMD dan arahan internal oleh masing-masing OPD.



3.8 Program dan kegiatan OPD pelaksana *Smart Regency*

3.8.1 *Smart Governance*

Tabel 3.13 Program dan Kegiatan Smart Governance

No	Kelompok Produk & Program	Pelaksana	Tujuan Utama	Status & Kendala	Anggaran
1	Perencanaan & Tata Kelola: Integrasi SIM, Dewan Smart City, Arsitektur SPBE.	Bappeda, DiskominfoSP	Sinkronisasi data dan arah kebijakan SPBE terpadu.	Berjalan. Masalah: Integrasi sistem & kesiapan SDM.	APBD
2	Layanan Perizinan: OSS, MPP Digital, Website Perizinan.	DPMPTSP	Mempermudah proses izin berbasis web & ponsel.	Berjalan. Kendala: Bandwidth internet di MPP.	APBD/N
3	Manajemen ASN: Si Ekin (Kinerja) & E-Presensi (Absensi).	BKPSDM	Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai.	Berjalan. Masalah: Gangguan server & habituasi.	APBD
4	Pajak & Keuangan: SISMIOP, 9 Pajak, SilperliME, E-BPHTB, e-BMD.	Bapenda, BPKAD	Optimalisasi PAD, transparansi SP2D, dan aset daerah.	Berjalan. Kendala: Beban server & integrasi SIPD.	APBD
5	Pemerintahan Desa: Siskeudes, Sipades, Simpapdes.	Dinas PMD	Tata kelola keuangan & seleksi perangkat desa akuntabel.	Berjalan. Masalah: Jaringan server ke desa.	APBD
6	Hukum & Organisasi: JDIH, Naskah Dinas, SKM Online, Prosbis, Whistle Blower.	Bag. Hukum, Organisasi, Insp.	Tertib administrasi, kepastian hukum, dan cegah KKN.	Berjalan/Akan. Masalah: Konsistensi penggunaan.	APBD
7	Arsip & Literasi: Srikandi, Tibame, Musrenbangda.	Perpus, Bappeda	Digitalisasi arsip dan jaring aspirasi desa.	Berjalan. Kendala: Kurangnya unit baca & disiplin input.	APBD
8	Kependudukan: Adminduk Online & 8 Inovasi Layanan (Pelanduk, dll).	Disdukcapil	Layanan KTP/Akta cepat dan gratis bagi warga.	Berjalan efektif melalui sistem jemput bola.	APBD
9	Infrastruktur & Siber: Command Center, FO, Bandwidth, SISTER, CSIRT.	DiskominfoSP	Konektivitas 256 desa dan keamanan data siber.	Berjalan. Kendala: Kerusakan hardware & celah siber.	APBD

3.8.2 Smart Branding

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan Smart Branding

No	Produk & Detail Program	Pelaksana	Tujuan & Sasaran	Status & Kendala	Anggaran & Mitra
1	Integrasi SIM: Penyusunan SIM Perencanaan Pembangunan (Simrenbangda-SIMDA-Simdalbangda) ³ .	Bappeda 4	Integrasi data keuangan dan evaluasi kinerja SKPD ⁵ .	Beralih ke SIPD & e-SAKIP. Sedang pengembangan sistem ⁶ .	Rp149.297.700 (APBD). Mitra: CV Diginet Media ⁷ .
2	Dewan TIK: Pembentukan Dewan Smart City & Tim Koordinasi SPBE ⁸ .	DiskominfoSP 9	Wadah koordinasi antar-sektor pembangunan daerah ¹⁰ .	Sudah berjalan berdasarkan SK Bupati sejak 2021 ¹¹ .	APBD ¹² .
3	SIM Perizinan: Website, PIR, LKPM, OSS, & MPP Digital ¹³ .	DPMPTSP 14	Efisiensi waktu dan transparansi izin investasi ¹⁵ .	Telah berjalan. Kendala: Bandwidth internet kurang stabil ¹⁶ .	±Rp104 Juta (APBD/N). Mitra: Berbagai Instansi ¹⁷ .
4	Si Ekin: Evaluasi Kinerja Pegawai berbasis web & ponsel ¹⁸ .	BKPSDM 19	Disiplin ASN & target indikator kinerja ²⁰ .	Sudah berjalan. Kendala: Adaptasi pengisian triwulan ²¹ .	APBD 2025. Mitra: PT Diginet Media ²² .
5	E-Presensi: Absensi Online harian berbasis ponsel ²³ .	BKPSDM 24	Monitoring kehadiran dan disiplin harian ASN ²⁵ .	Sudah berjalan. Kendala: Gangguan server Kominfo ²⁶ .	PT Diginet Media ²⁷ .
6	SISMIOP: Pengelolaan Pajak Daerah (PBB-P2) berbasis Web ²⁸ .	Bapenda 29	Akurasi data & optimalisasi PAD sektor pajak ³⁰ .	Telah berjalan. Kendala: Jaringan dan beban server ³¹ .	Rp95.000.000 (APBD). Mitra: Bank Sumsel Babel, BRI, Pos ³² .

3.8.3 Smart Economy

Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Smart Economy

No	Kelompok Produk & Program	Pelaksana	Tujuan Utama	Status & Kendala	Anggaran
1	Tata Kelola & Perencanaan: Integrasi SIM, Dewan TIK, & Peta Rencana SPBE.	Bappeda, KominfoSP	Sinkronisasi data & kebijakan SPBE.	Berjalan; kendala integrasi SIPD.	APBD
2	Layanan Perizinan: Sistem Informasi Perizinan Terpadu.	DPMPTSP	Efisiensi & penyederhanaan izin.	Berjalan; kendala bandwidth internet.	APBD/N
3	Manajemen ASN: Si Ekin & E-Presensi.	BKPSDM	Disiplin & kinerja pegawai.	Berjalan; kendala gangguan server.	APBD
4	Keuangan & Pajak: SISMIOP, SilPerLiME, e-BMD, 9 Pajak, & E-BPHTB.	Bapenda, BPKAD	Akurasi data & optimalisasi PAD.	Berjalan; beban server tinggi.	APBD
5	Pemerintahan Desa: Keuangan Desa, Jaringan Desa, & SIMPAPDES.	Dinas PMD, Kominfo	Akuntabilitas & konektivitas desa.	Berjalan; gangguan jaringan desa.	APBD
6	Hukum & Administrasi: Whistle Blower, Arsip, JDIH, Tata Naskah, SKM, & Prosbis.	Bag. Hukum, Org, Insp	Tertib administrasi & cegah KKN.	Berjalan; kendala disiplin input.	APBD
7	Layanan Publik: TIBAME, Musrenbangda, & Adminduk Online.	Perpus, Bappeda, Capil	Literasi & layanan kependudukan cepat.	Berjalan efektif; sistem jemput bola.	APBD
8	Infrastruktur & Keamanan: Command Center, Bandwidth, SISTER, Tenaga IT, & CSIRT.	Kominfo	Konektivitas & keamanan siber.	Berjalan; audit keamanan BSSN.	APBD

3.8.4 Smart Society

Tabel 3.16 Program dan Kegiatan Smart Society

No	Kelompok Produk & Program	Pelaksana	Tujuan Utama	Status & Kendala	Anggaran
1	Pendidikan & Literasi: Beasiswa Prestasi, Pendaftaran Siswa Online, & Literasi Digital.	Dinas Pendidikan, DiskominfoSP	Meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan.	Sedang berjalan. Kendala: -	-
2	Kesehatan & Gender: Sistem Informasi Gender (SIGA) & SINDERELA (Remaja).	Dinas PPPA, Dinas PPKB	Memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak.	Sedang berjalan. Kendala: -	Rp175.862.500
3	Keamanan & Ketertiban: Pendidikan Politik, Multicultural Camp, Sosialisasi Bencana, & IP CCTV.	Kesbangpol, BPBD, Perhubungan, Kominfo	Menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteram, dan rukun.	Berjalan tahunan. Kendala: Belum ada konsultan pelaksana.	±Rp21 Juta
4	Perlindungan Sosial: Santunan Kematian, PKH Membara, & Bantuan Korban Bencana.	Dinas Sosial	Meringankan beban finansial warga miskin dan korban bencana.	Akan berjalan. Kendala: Validasi data BNBA masyarakat miskin.	±Rp11,6 Miliar
5	Ketenagakerjaan: Pasar Kerja Digital & Integrasi Data Naker.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Menyediakan informasi pasar kerja real-time.	Sedang berjalan. Kendala: -	-
6	Informasi & Layanan Digital: Perpus Digital, ME-IDIS (Bencana), KIM, & Cerita Anak (CERIA).	Perpus, Dispora, BPBD, DiskominfoSP	Mempermudah layanan publik dan akses informasi berbasis TIK.	Telah berjalan. Kendala: Keterbatasan anggaran.	±Rp490 Juta

3.8.5 Smart Living

Tabel 3.17 Program dan Kegiatan Smart Living

No	Kelompok Produk & Program	Pelaksana	Tujuan Utama	Status & Kendala	Anggaran
1	Fasilitas Umum & Ruang Terbuka: Pembangunan Taman Tematik & Rehabilitasi Fasilitas Publik.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim)	Meningkatkan interaksi sosial dan mutu kehidupan warga melalui PSU yang memadai.	Sedang berjalan. Kendala: Rehabilitasi fasilitas penunjang taman masih berlangsung.	APBD
2	Kesehatan & Sanitasi: Puskesmas Ramah Anak, Penanganan Stunting, & Pengelolaan Air Limbah Domestik.	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas dan lingkungan yang sehat.	Telah berjalan. Kendala: Rendahnya kesadaran masyarakat akan sanitasi dan stunting.	APBD
3	Pemukiman Layak Huni: Bedah Rumah (BSPS) & Penataan Kawasan Kumuh.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Sedang berjalan. Kendala: Keterbatasan usulan dan validasi data calon penerima.	APBD
4	Ketahanan Pangan: Kawasan Pangan Mandiri & Distribusi Pangan Murah.	Dinas Ketahanan Pangan	Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.	Berjalan rutin. Kendala: Fluktuasi harga pasar dan tantangan distribusi.	APBD
5	Transportasi & Keamanan: Layanan Bus Sekolah (Antar-Jemput Siswa) & Penerapan ATCS/CCTV.	Dinas Perhubungan, Diskominfo	Meningkatkan keselamatan dan efisiensi mobilitas warga serta siswa.	Sedang berjalan. Kendala: Belum semua kecamatan terakomodasi unit bus.	±Rp602 Juta/unit bus.
6	Mitigasi Bencana: Sistem Peringatan Dini (EWS) Terintegrasi Berbasis TIK.	BPBD, Diskominfo	Melindungi warga secara real-time melalui deteksi dan pemantauan otomatis.	Tahap penyusunan dokumen DED (APBD-P 2025). Kendala: Estimasi anggaran besar.	APBD-P 2025

3.8.6 Smart Environment

Tabel 3.18 Program dan Kegiatan Smart Environment

No	Kelompok Produk & Program	Pelaksana	Tujuan Utama	Status & Kendala	Anggaran
1	Monitoring Polusi & Laboratorium: Peningkatan Kualitas Lab (Alat & SDM) serta Pemasangan Sensor Polusi Air/Udara.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan melalui pemantauan real-time.	Telah berjalan. Kendala: -	±Rp799 Juta
2	Geospasial & Tata Ruang: Database Informasi Geospasial & Pemetaan Wilayah Berbasis 3D.	Bappeda, Dinas PUPR, Balitbangda	Sinkronisasi data lokasi dan pemetaan daerah dalam satu sistem.	Sedang proses instalasi ulang geoportal. Kendala: Akses aplikasi.	APBD
3	Pengelolaan Limbah & Sampah: Perbaikan Tata Kelola Limbah & Sanitasi Rumah Tangga.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sirkular.	Telah berjalan. Kendala: -	Rp129.734.568
4	Pengawasan & Perizinan: Sistem Inventarisasi Database Persetujuan Lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup	Mempercepat pengawasan perusahaan yang memiliki izin lingkungan.	Sedang berjalan. Kendala: -	Rp99.800.000
5	Energi Terbarukan: Program Pemanfaatan Energi Terbarukan (PLTP & PLTS).	Perindag ESDM, PT. BA, PLN, Pertamina	Diversifikasi energi untuk kelestarian lingkungan dan efisiensi.	Telah berjalan (BUMN). Kendala: Biaya pembangunan tinggi.	BUMN / APBD

3.9 Quick Wins Muara Enim Smart Regency

Konsep *Smart Regency* (Kabupaten Cerdas) bertujuan menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan. Proses transformasi menuju *Smart Regency* adalah jangka panjang dan kompleks. Di sinilah quick wins memainkan peran kritis, karena Quick Wins adalah hasil atau pencapaian yang dapat diraih dengan cepat, mudah, dan biaya rendah, namun memberikan dampak positif yang nyata dan langsung terasa bagi masyarakat atau stakeholders. Dalam konteks pembangunan, *quick wins* adalah langkah-langkah taktis yang menunjukkan komitmen dan kemampuan pemerintah dalam waktu singkat.

Tabel 3.19
Quick Wins Muara Enim Smart Regency

Aspek Smart Regency	Program Quick Win	Target dan Manfaat	Timeline
Smart Governance	Platform Partisipasi Publik "Muara Enim Sapa": Aplikasi/web untuk aspirasi, pengaduan, dan survei kebijakan.	Meningkatkan transparansi dan partisipasi warga. Membangun data untuk perbaikan layanan.	Tahun 2026-2027
	Pelatihan Kapabilitas Manajerial Dinamis: Fokus pada kepemimpinan adaptif, inovasi, dan manajemen proyek digital bagi ASN.	Sumber Daya Manusia pemerintah siap mengadopsi teknologi. Mendorong inovasi dari dalam.	Tahun 2026
Smart Branding	Kampanye Digital "Enim Keren": Sorot keunikan alam (Geopark), budaya, & produk UMKM melalui konten visual di media sosial.	Meningkatkan kesadaran dan citra. Menarik minat wisatawan dan investor.	Tahun 2026-2027
	Pengembangan Logo & Tagline Daerah: Menciptakan identitas visual yang modern dan mudah diingat.	Memperkuat identitas dan kebanggaan daerah.	Tahun 2026
Smart Economy	Pusat Digitalisasi UMKM: Bimbingan online, pemasaran digital, dan akses pembiayaan untuk produk unggulan (kopi, kerajinan).	Meningkatkan pendapatan UMKM dan perluasan pasar.	Tahun 2027-2028



Aspek Smart Regency	Program Quick Win	Target dan Manfaat	Timeline
	Paket Insentif Investasi Sektor Hijau: Fokus pada ekowisata, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan.	Menarik investasi yang selaras dengan pelestarian lingkungan.	Tahun 2027-2028
Smart Society	Wi-Fi Publik & Pelatihan Literasi Digital: Sediakan akses internet gratis di ruang publik & adakan pelatihan dasar.	Mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kapasitas masyarakat.	Tahun 2026-2027
	Komunitas Inovator Daerah: Wadah bagi pemuda, akademisi, dan pelaku bisnis untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah daerah.	Memberdayakan potensi lokal dan menciptakan solusi inovatif.	Tahun 2027-2028
Smart Living	Sistem Informasi Kesehatan Terpadu: Layanan janji temu dokter online & informasi fasilitas kesehatan.	Meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan dasar.	Tahun 2027-2028
	Aplikasi Transportasi Lokal: Integrasi informasi angkutan umum & pemantauan kondisi jalan.	Memudahkan mobilitas warga dan meningkatkan keselamatan.	Tahun 2028
Smart Environment	Sistem Pemantauan Kualitas Air & Udara: Pasang sensor di titik strategis, data diakses publik via papan digital/website.	Transparansi kondisi lingkungan dan dasar kebijakan.	Tahun 2027-2028
	Program "Bank Sampah Digital": Aplikasi untuk mencatat setor sampah yang dapat ditukar poin atau insentif.	Mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.	Tahun 2027



BAB 4

PENUTUP

Smart Regency bukan hanya digitalisasi layanan, tetapi transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi, proses, dan budaya kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan bertahap—fondasi, akselerasi, hingga inovasi—kabupaten membangun sistem yang terhubung, efisien, dan responsif. Teknologi menjadi pendukung tata kelola, ekonomi, dan kualitas hidup, sementara masyarakat dan pemerintah berkolaborasi dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

Adanya keberadaan Masterplan Muara Enim Smart Regency merupakan dokumen pendukung atas implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada (RPJMD). Sebagai sebuah dokumen yang memiliki jangka waktu multi tahun, dengan mengacu kepada arah pembangunan yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Muara Enim 2005-2025, serta melibatkan arah dan kebijakan strategis Kepala Daerah serta sasaran pembangunan strategis yang dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029).

Oleh karena itu, *Masterplan Muara Enim Smart Regency* merupakan sebuah dokumen hidup (*living document*) yang akan menyesuaikan perkembangan teknologi dan dunia luar baik secara nasional/internasional. Dokumen ini dapat juga menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, baik di tingkat tertinggi di Muara Enim yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga di jajaran Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Daerah Kab. Muara Enim dalam melaksanakan proses pembangunan daerah dengan pendekatan *smart regency* yang telah dikontekstualisasikan dengan kondisi geo-strategis serta budaya dan tradisi yang luhur yang dimiliki oleh masyarakat Muara Enim.

Dalam Buku II ini, telah disajikan secara lengkap tentang pembangunan Kabupaten Muara Enim menuju *Smart Regency* tahun 2026-2029. Diharapkan, para pembuat kebijakan dapat memahami esensi dalam membangun kabupaten yang cerdas menuju peningkatan ekonomi dan kualitas masyarakatnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komputer.

